

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**MASA PEMERINTAHAN
KABINET ALI SASTROAMIJOJO II
(1956-1957)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah**



Oleh :

DEVI OKTATENDRA

NIM : 951314023

NIRM : 950051120604120023

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2002**

SKRIPSI

MASA PEMERINTAHAN
KABINET ALI SASTROAMIJOJO II
(1956-1957)

Oleh :

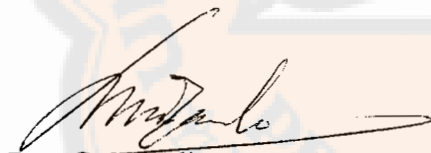
DEVI OKTATENDRA

NIM : 951314023

NIRM : 950051120604120023

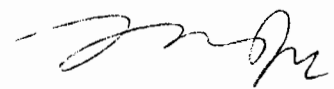
Telah disetujui oleh:

Pembimbing I


Drs. G. Moedjanto, M.A.

Tanggal... 4/7/2002

Pembimbing II


Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R.

Tanggal... 4/7/2002

SKRIPSI

**MASA PEMERINTAHAN
KABINET ALI SASTROAMIJOJO II
(1956-1957)**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

DEVI OKTATENDRA

NIM : 951314023

NIRM : 950051120604120023

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 4 Mei 2002
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R.
Sekretaris Drs. B. Musidi, M.Pd.
Anggota Drs. G. Moedjanto, M.A.
Anggota Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R.
Anggota Drs. A.A. Padi

Yogyakarta, 24 Mei 2002
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma
Dekan,

DR. AM. Slamet Soewandi, M.Pd.

HALAMAN PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

1. PAPA DAN MAMAKU TERCINTA.
2. KAKAKKU DEDDY NOVERTA (ALM) DAN ADIK-ADIKKU DENNY, DESTY, DERCE, DAN DEERY (N`DHUT) YANG TERSAYANG.
3. AA AMDHI RISTANTO (MUTIARA HATI YANG MEMBERI SEMANGAT, HARAPAN, DUKUNGAN DAN CINTANYA).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO

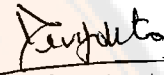
- ❖ KEBAHAGIAAN HIDUP ITU ADA DALAM KETENTRAMAN HATI (SOFEL/BR. 76)
- ❖ SESUNGGUHNYA SETIAP KESULITAN PASTI ADA KEMUDAHAN.
(SURAT AL INSYIRAH)
- ❖ KEBERHASILAN DATANG LEWAT PENDERITAAN.
(VER BASUKI MAWA BEA)
- ❖ SIAPA YANG MERINGANKAN BEBAN SEORANG MUKMIN DI DUNIA, PASTI ALLAH AKAN MERINGANKAN BEBAN PENDERITAANNYA DI AKHIRAT KELAK. SIAPA YANG MEMUDAHKAN ORANG DALAM KEADAAN SUSAH, PASTI ALLAH AKAN MEMUDAHKAN URUSANNYA DI DUNIA DAN AKHIRAT. SIAPA YANG MEMUTUPI AIB SEORANG MUSLIM PASTI ALLAH AKAN MEMUTUPINYA (AIBNYA) DI DUNIA DAN DI AKHIRAT. DAN ALLAH AKAN SELALU MENOLONG HAMBANYA JIKA HAMBANYA TERSEBUT MENOLONG SAUDARANYA.
(H.R. MUSLIM)

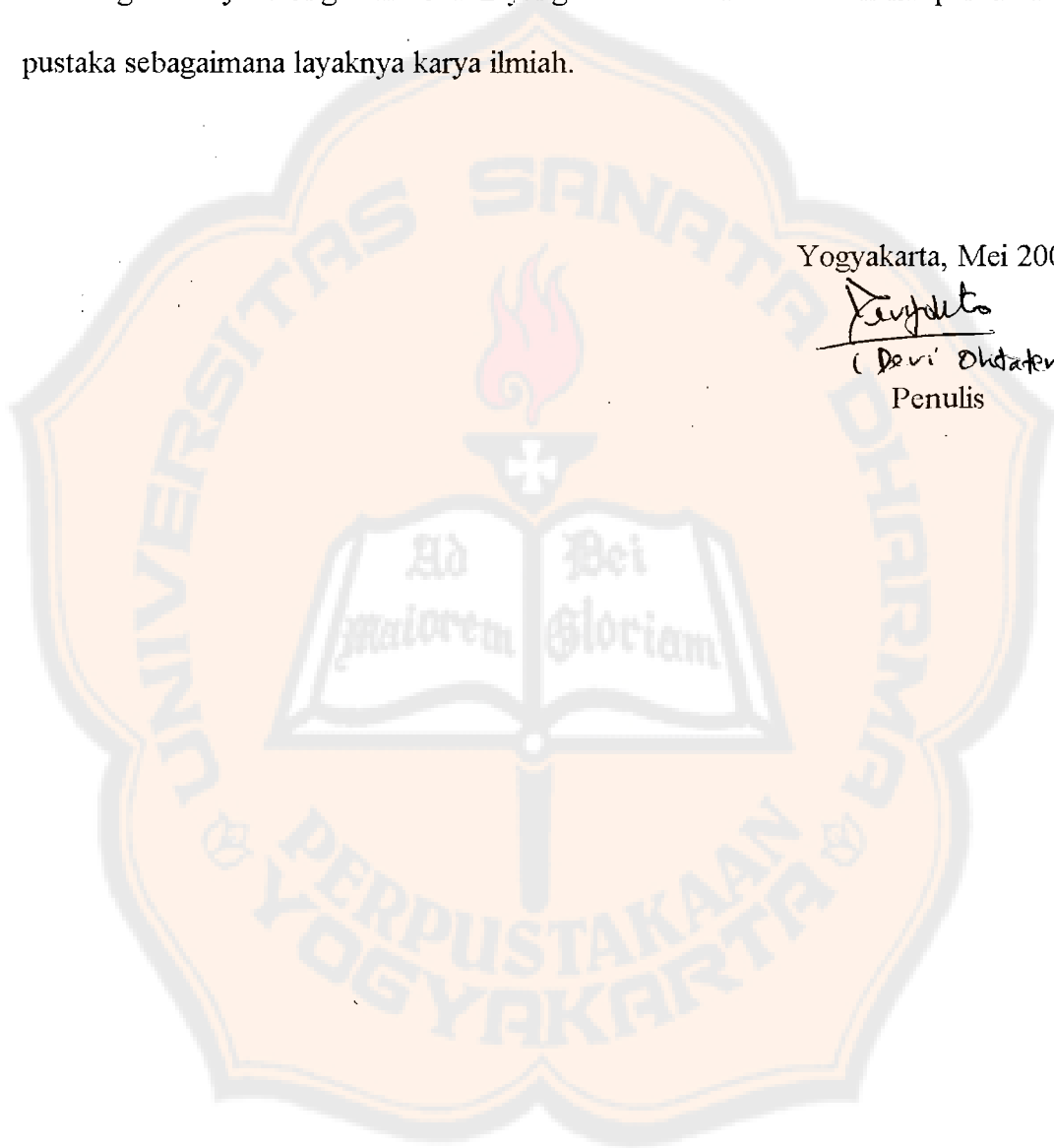
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan atau daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, Mei 2002


(Devi Dhuratendra)
Penulis



ABSTRAK

**MASA PEMERINTAHAN
KABINET ALI SASTROAMIJOJO II
(1956 – 1957)**

**DEVI OKTATENDRA
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab tiga permasalahan : pertama, menjelaskan proses pembentukan kabinet Ali Sastroamijoyo II; kedua, program dan pelaksanaan kabinet Ali Sastroamijoyo II; ketiga, sebab jatuhnya kabinet Ali Sastroamijoyo II. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan model deskriptif analisis.

Pembentukan kabinet Ali Sastroamijoyo II mendapat dukungan sepenuhnya dari DPR. Dalam pelaksanaannya kabinet Ali Sastroamijoyo II menemui kesulitan karena banyaknya konflik contohnya konflik antar partai, konflik dalam tubuh Angkatan Darat. Selain itu ada juga pemberontakan di daerah Sumatera dan Sulawesi, korupsi pejabat pemerintah, yang menghambat pelaksanaan kabinet Ali Sastroamijoyo II. Berbagai usaha sudah dilakukan untuk meredakan masalah tersebut, tapi usaha itu tidak berhasil. Akhirnya pada tanggal 14 Maret 1957 Ali Sastroamijoyo II mengundurkan diri yang kemudian diumumkan keadaan SOB (darurat perang) oleh Presiden Soekarno.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian membuktikan bahwa peranan Ali Sastroamijoyo dalam menjalankan kabinet sangat besar, terutama dalam pembentukan kabinet, penyusunan dan pembuatan program kabinet dan pelaksanaan kabinet. Jasa Ali Sastroamijoyo dalam masa pemerintahannya antara lain membuat UU No.1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, pengiriman misi Garuda ke Mesir dan pembatalan perjanjian KMB. Pada masa pemerintahan Ali Sastroamijoyo II ini juga ada peristiwa penting yaitu mundurnya Mohhammad Hatta sebagai wakil presiden. Mundurnya Mohhammad Hatta disebabkan karena adanya perbedaan pandangan politik dengan Soekarno.

ABSTACT

**PERIOD OF CABINET
GOVERMENT ALI SASTROAMIJOJO II
(1956 – 1957)**

DEVI OKTATENDRA
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA

This thesis aims to answer three problems : first, to explain the process of cabinet formation Ali Sastroamijojo II; second, program and implemantion of cabinet Ali Sastroamijojo II; third, cause fall of the cabinet Ali Sastroamijojo II. This thesis uses metode of literature research with analysis descriptive model.

Formation of cabinet Ali Sastroamijojo II got fully support from DPR (legislative assembly). In the implementation of cabinet Ali Sastroamijojo II meet difficulty because of many conflicts, for example conflict between party, conflict internal of Army. Beside that, there were rebellion in Sulawesi and Sumatera, coruption of government official inhibit the implementation of cabinet Ali II. Many thing has been done to reduce its problem, but that effort did not succeed. Lastly on March 14, 1957 Ali Sastroamijojo retired then announced SOB situation (war emergency) by Presiden Soekarno.

Result that was gained in research proving that role of Ali Sastroamijojo in cabinet was very big, specially in formation of cabinet, arrange making program of cabinet and implementation of cabinet. Importan role that Ali Sastroamijojo in period of his government such as making of constitusion no. 1, 1957 about matters of region goverment, sending mission of Garuda to Egypt and canceling agrement KMB on goverment Ali II, there was also event namely resignation of Mohhamad Hatta from his position as vice-president. The resignation of Hatta happened because there was different view of politic of Soekarno.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma.
2. Kepala Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma.
3. Kepala Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma.
4. Bapak Drs. G. Moedjanto, M.A., selaku pembimbing I yang telah bersedia membimbing dan mengoreksi skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R., selaku pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengoreksi skripsi ini hingga selesai.
6. Staf perpustakaan wilayah Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman buku-buku yang diperlukan.
7. Staf perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman buku-buku yang diperlukan bagi penulisan skripsi ini.
8. Mama dan Papa atas doa dan telah membiayai selama pendidikan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

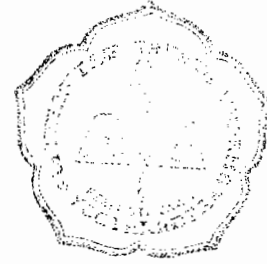
9. Om Rio dan Tante Rini, atas motivasi dan nasehat-nasehatnya.
10. Kakak-kakak sepupuku (Wiwin, Yopa, Leo, Noviet, Fitra) atas perhatian, kebaikan, hiburan yang telah diberikan selama ini.
11. Aa Andhi Ristanto, yang memberikan semangat, kasih sayang dan selalu menguatkan aku pada masa sedihku (thanks banget say).
12. Sahabatku Wiwid, Irma, Lani, Robert, yang telah menemani hari-hari suka dan dukaku.
13. Anak-anak kost Anggajaya I no. 268. Yogyakarta.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis dengan senang hati bersedia menerima sumbangan baik pemikiran, kritik maupun saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja.

Yogyakarta, Mei 2002

Penulis

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Sumber	7
F. Landasan Teori.....	8
G. Metodologi dan Pendekatan.....	19
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II PROSES PEMBENTUKAN KABINET ALI II.....	24
A. Biografi Ali Sastroamijoyo	24

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Sejarah Terbentuknya Kabinet Ali Sastroamijoyo II.....	27
C. Program Kerja dan Susunan Kabinet Ali Sastroamijoyo II	35
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KABINET ALI II.....	42
A. Pembatalan KMB	42
B. Perjuangan Irian Barat.....	48
C. Memulihkan Keamanan dan Ketertiban, Pembangunan Ekonomi, Keuangan, Industri, Pertanian, Perhubungan dan Pendidikan	50
D. Melaksanakan Keputusan Konferensi Asia-Afrika	61
BAB IV JATUHNYA KABINET ALI II.....	63
A. Kemerostan Ekonomi.....	65
B. Pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi.....	68
C. Perpecahan Soekarno-Hatta.....	77
D. Konsepsi Presiden.....	81
E. Meruncingnya Pertentangan Dalam Tubuh Angkatan Darat	85
BAB V SIMPULAN.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 1950-an memang menarik dan unik, salah satunya yang menarik adalah banyaknya kabinet yang berkembang di Indonesia. Kabinet berkembang, jatuh bangun, dan salah satunya adalah kabinet Ali Sastroamijoyo II. Partai-partai yang berkembang saat itu saling memperagakan ideologi dan program yang mereka andalkan.¹

Pemilu I di Indonesia berlangsung pada tahun 1955. Dengan adanya pemilihan umum ini maka kabinet Burhanudin Harahap harus rela meletakkan jabatannya dan kabinet Ali Sastroamijoyo II berhak menduduki pemerintahan dengan dukungan DPR. Untuk lebih mengefektifkan kedudukannya maka kabinet Ali II mengajukan Rancangan Undang-Undang yang mirip dengan kabinet Burhanudin Harahap. Rancangan tersebut akhirnya disetujui oleh DPR pada tanggal 21 April 1956.

Pada saat itu, partai-partai di Indonesia berkembang saling menunjukkan kekuatan dan kelemahannya masing-masing dan dapat dikatakan partai-partai di Indonesia belum stabil. Hal ini disebabkan karena adanya tekanan-tekanan politik dalam negeri Republik Indonesia sendiri dan juga karena adanya diplomasi dengan Belanda.² Partai yang paling menguasai medan politik di Indonesia pada

¹ Taufik Abdullah, *Sejarah Indonesia (Penilaian Kembali Karya Utama Sejarahwan Asing)*, Depok, Pusat Penelitian Kemasyarakatan Dan Budaya Lembaga Penelitian UI, 1997, hlm. 2.

² A.B. Lopian, *Terminologi Sejarah*, Jakarta, Departemen P dan K, 1996, hlm. 224.

periode itu adalah Masyumi dan PNI.³ Kedua partai itu saling bersaing untuk merebut hati rakyat Indonesia.

Periode 1950-1957 ditandai dengan sering jatuh bangunnya kabinet. Selama periode tersebut Indonesia telah berganti kabinet sebanyak tujuh kali. Jadi satu kabinet rata-rata berusia satu tahun. Jatuhnya kabinet disebabkan karena sukarnya terbentuk koalisi yang dapat bertahan lama. Hal tersebut juga disebabkan oleh jumlah partai dan fraksi yang banyak yang masing-masing tidak mempunyai dominasi.⁴

Dengan sering jatuhnya kabinet, apalagi usia masing-masing sangat singkat, maka program pembangunan tidak bisa berjalan baik. Program kabinet yang satu belum selesai, sudah menyusul program yang lain dari kabinet yang lain pula. Sebagai akibatnya terjadilah krisis ekonomi, manipulasi, korupsi, serta kesenjangan kemajuan antara pusat dan daerah, antara Jawa dan luar Jawa.⁵

Kabinet Ali Sastroamijoyo II resmi terbentuk tanggal 8 Maret 1956 atas persetujuan Presiden Soekarno. Pembentukan kabinet Ali Sastroamijoyo II berjalan lancar karena situasi dan kondisi pada waktu itu cukup tenang. Dalam usaha melaksanakan pemerintahannya, maka kabinet Ali Sastroamijoyo II menyusun program-program dan susunan kabinet yang akan diajukan kepada Presiden Soekarno.

Pada tanggal 16 Maret 1956 Ali Sastroamijoyo menghadap Presiden Soekarno untuk melaporkan hasil pembentukan kabinet barunya dan program-

³ Ahmadani, *Pemuda Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*, Jakarta, Purbasari, 1984, hlm. 235.

⁴ Suswanta, *Keberanian Untuk Takut*, Yogyakarta, Avyrouz, 2000, hlm. 31.

⁵ *Ibid.*

program yang sudah ia disusun. Presiden Soekarno menunjukkan reaksi yang kecewa setelah melihat program-program dan susunan kabinet yang dibuat oleh kabinet Ali Sastroamijoyo II. Akhirnya setelah mengalami perubahan-perubahan, maka pada tanggal 26 Maret 1956, kabinet Ali Sastroamijoyo II baru resmi menjalankan kabinetnya.

Kondisi pada masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamijoyo II ini tidak stabil, contohnya adalah adanya peristiwa Teluk Nibung di Sumatera Utara. Peristiwa ini terjadi pada pertengahan tahun 1956. Peristiwa ini merupakan serangkaian peristiwa yang terjadi akibat adanya rasa tidak puas pemerintah daerah terhadap pemerintahan pusat, karena alokasi dana yang tidak seimbang antara pusat dan daerah.

Peristiwa di Teluk Nibung dipelopori oleh Kolonel Simbolon, panglima divisi Bukit Barisan di Sumatera Utara dengan dibantu oleh seorang pedagang besar Cina di Medan. Alasan Kolonel Simbolon mengadakan penyelundupan tersebut adalah untuk memperoleh dana bagi proyek-proyek kehidupan anak buahnya yang sangat buruk akibat kurangnya dana dari pusat. Akan tetapi pemerintah tidak menerima alasan tersebut dan Kolonel Simbolon dianggap telah menyalahgunakan wewenangnya. Pada tanggal 8 Juli 1956, pemerintah mengeluarkan perintah untuk menghentikan penyelundupan itu. Pada saat itu pemerintah tidak mengambil tindakan tegas karena ada alasan-alasan politis.⁶

⁶ Nugroho Notosusanto, *Ichisar Sejarah Republik Indonesia 1945-sekarang*, Djakarta, Depa.temen Pertahanan–Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1971, hlm. 73.

Daerah pertama yang berani menentang pusat adalah Sumatera Barat yang dipelopori Letnan Kolonel Akhmad Husein yang kemudian diikuti oleh daerah Sumatera Utara yang dipelopori oleh Kolonel Simbolon sedangkan di daerah Sumatera Selatan dipelopori Letnan Kolonel Barlian. Keadaan politik dan situasi umum dalam negeri, terutama Angkatan Darat, menyebabkan timbulnya gerakan-gerakan daerah yang dipimpin oleh pihak militer setempat.

Kabinet Ali II yang merupakan koalisi partai-partai terbesar, PNI-Masyumi-NU, diharapkan dapat memulihkan masalah yang ada pada masa itu. Banyaknya masalah yang timbul mengakibatkan krisis dan ini merupakan tantangan bagi pemerintahan Ali II.

Pemilihan Umum yang diharapkan sebagai obat mujarab, setelah terbentuknya kabinet baru malah menimbulkan kekecewaan yang sangat besar terhadap pemerintah.⁷ Situasi politik tidak menentu, ada pertentangan antar partai, korupsi merajalela, ekonomi semakin memburuk. Sebagai protes dari keadaan tersebut pada bulan Mei 1956 terjadi penyelundupan di daerah-daerah. Penyelundupan-penyeludupan ini dipelopori oleh para penguasa militer setempat. Alasan para penguasa militer tersebut mengadakan penyelundupan adalah demi kesejahteraan daerah masing-masing.

Pada detik-detik sejarah yang diliputi oleh suasana serius itu masyarakat mengalami berkobarnya pertentangan-pertentangan pendapat dan sikap, antara golongan yang membela dan mendukung Konsepsi Presiden dengan golongan

⁷ Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1982, hlm. 83.

yang tidak menyetujuinya, maka tidaklah mengherankan bahwa segenap perhatian bangsa dipusatkan kepada kepala negara.⁸

Dalam keadaan yang hangat itu Presiden Soekarno melontarkan pendapat bahwa segala kesulitan yang sedang dihadapi negara adalah bersumber pada banyaknya partai, sehingga merusak persatuan bangsa. Untuk menyelamatkan negara maka Presiden Soekarno mengajukan sebuah konsepsi. Konsepsi ini mendapat tentangan dari berbagai pihak.

Partai-partai Masyumi, NU, PSII dan PRI menolak konsepsi yang diajukan oleh Presiden Soekarno dan berpendapat bahwa merubah susunan ketatanegaraan secara radikal seperti itu adalah suatu hal yang harus diserahkan kepada Majelis Konstituante yang kompeten. Suasana tegang timbul setelah propaganda untuk melaksanakan Konsepsi Presiden Soekarno mendapat tentangan dari daerah-daerah sehingga gerakan-gerakan daerah semakin memuncak dan semakin meluas. Suasana tegang dan hangat makin menguasai kehidupan politik di ibukota.⁹

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam skripsi yang berjudul "Masa Pemerintahan Kabinet Ali Sastroamijoyo II" ini adalah :

1. Bagaimana proses pembentukan kabinet Ali Sastroamijoyo II ?
2. Bagaimana program dan pelaksanaan kerja kabinet Ali Sastroamijoyo II ?
3. Mengapa kabinet Ali Sastroamijoyo II jatuh ?

⁸ Kementerian Penerangan, *Kabinet Karya*, Djakarta, Kementerian Penerangan, 1957, hlm. 15.

⁹ Nugroho Notokusanto, *op. cit.*, hlm. 74.

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan Penelitian ini adalah sesuai dengan permasalahan yaitu ingin menjelaskan bagaimana proses pembentukan kabinet Ali Sastroamijoyo II, menjelaskan bagaimana program kerja dan pelaksanaan kabinet Ali Sastroamijoyo II sewaktu masa pemerintahannya dan menjelaskan sebab-sebab jatuhnya kabinet Ali II.

D. Manfaat Penelitian.

1. Bagi perkembangan penulisan sejarah adalah untuk memperkaya khasanah tulisan sejarah nasional di Indonesia.
2. Bagi Universitas Sanata Dharma.
Untuk melaksanakan salah satu butir Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Penelitian.
3. Bagi Dunia Pendidikan.
Untuk menambah perbendaharaan pengetahuan khususnya sejarah nasional di Indonesia.
4. Bagi Peneliti.
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya penelitian sejarah lokal di Indonesia.
 - b. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Sarjana Pendidikan di Universitas Sanata Dharma.

E. Tinjauan Sumber

1. Sumber Primer

Harian Lembaga, *Kabinet Mulai Tugasnja*, 28 Maret 1956.

Harian Lembaga, *Tidak ada Daerah Jang dianaktirikan*, 6 April 1956.

Harian Mimbar Umum, *Sebab-sebab Perdjudjian KMB Terpaksa Dibatalkan*, Sabtu 7 April 1956.

Harian Mimbar Umum, *Pendjelasan Pemerintah Tentang RUU Pembatalan Persetujuan KMB*, Sabtu 9 April 1956.

Harian Pedoman Rakyat, *Perdjuangan Irian Barat*, Rabu 23 Mei 1956.

Harian Surat Kabar Kebangsaan Non-Partai, *Indonesia Akan Membuat Pembangunan Jang Seimbang*, 26 Juni 1956.

Harian Lembaga, *Mengadakan Hubungan Ekonomi Dengan Djerman Barat*, 14 Juli 1956.

2. Sumber Sekunder

Buku-buku yang berkaitan untuk menjawab masalah-masalah pada masa pemerintahan kabinet Ali II ini adalah : *Tonggak-tonggak di perjalananku*, karya Ali Sastroamijoyo; *PRRI PERMESTA*, karya R. Z. Leirissa; *Indonesia Abad ke-20 Jilid 2*, karya G. Moedjanto; *Dasar-dasar Ilmu Politik*, karya Miriam Budiarmo; *Memenuhi Panggilan Tugas*, karya A.H. Nasution; *Metode Penelitian Bidang Sosial*, karya Hadari Nawawi; *Mengerti Sejarah*, karya Louis Gottschalk; *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, karya Sartono Kartodirdjo; *Politik Militer Indonesia 1945–1967*, karya U.L.V. Sundhaussen; *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945–1966*, karya Yahya A. Muhaimin;

Kabinet Karya dari Kementerian Penerangan RI; *Sistem Pemerintahan Indonesia*, karya C.S.T. Kansil; *Terminologi Sejarah*, karya A.B. Lopian; *Ichtisar Sejarah Republik Indonesia 1945–sekarang*, karya Nugroho Notosusanto; *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, karya Herbert Feith; *Keberanian Untuk Takut*, karya Suswanta; *Profil Seorang Prajurit TNI*, karya Amelia Yani; *Soekarno Dan Militer dalam Demokrasi Terpimpin*, karya Herbert Feith; *Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Perjuangan Bangsa*, karya Ahmaddani; *Sejarah Indonesia (Penilaian Kembali Karya Utama Sejarawan Asing)*, karya Taufik Abdullah; *Bung Karno dengan Tokoh-Tokoh Komunis*, karya Ahmad Muhsin; *Kedudukan Presiden Menurut Tiga UUD dalam Teori dan Praktek*, karya A.K. Pringgodigdo; *Metodologi Penelitian*, karya Sumadi Suryabrata; *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, karya Adnan Buyung Nasution; *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensiil*, karya Arend Lijphart; *A Behavioral Approach to Historical Analysis*, karya Robert F. Berkhofer.

F. Landasan Teori.

Berkaitan dengan judul skripsi “Masa Pemerintahan Kabinet Ali Sastroamijoyo II” ini ada beberapa konsep yang perlu dipahami.

1. Bentuk Pemerintah.

- a. Pemerintah dalam arti sempit dimaksudkan khusus kekuasaan eksekutif. Contoh : menurut UUD 1945 pemerintah adalah presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri.
- b. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara yang termasuk DPR. Bentuk pemerintah yang terkenal adalah kerajaan (*monarki*) dan

republik. Kerajaan atau *monarki* adalah negara yang dikepalai oleh seorang raja dan bersifat turun-temurun dan menjabat untuk seumur hidup. Selain raja, kepala negara suatu *monarki* dapat berupa kaisar atau syah. Republik adalah negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala negara yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu (Amerika Serikat 4 tahun, Indonesia 5 tahun). Biasanya presiden dapat dipilih kembali setelah habis masa jabatannya.¹⁰

2. Sistem Pemerintahan Negara.

Sistem Pemerintahan Negara yang ditegaskan dalam UUD adalah¹¹ :

a. Indonesia

Adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), negara Indonesia berdasar atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

b. Sistem Konstitusional.

Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

c. Kekuasaan negara yang tertinggi berada ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

3. Bentuk Negara

A. Negara Kesatuan

Bentuk ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1). Tidak ada negara dalam negara.

¹⁰ C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, hlm. 21.

¹¹ *Ibid*, hlm. 36.

- 2). Pemerintah pusat memiliki kedaulatan penuh secara intern maupun ekstern.
- 3). Hanya memiliki satu konstitusi / UUD.

Penyelenggaraan negara kesatuan ada dua sistem, yaitu :

1. Negara Kesatuan Dengan Sistem Sentralisasi

Penerapan sistem ini pemerintah pusat menjalankan seluruh bidang kekuasaan pemerintahan, sedang daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan peraturan dan perintah dari pemerintah pusat. Jadi daerah tidak berhak mengadakan peraturan sendiri.

Keuntungan sistem sentralisasi adalah :

- a). Memperkuat kesatuan politik dan mencegah keinginan daerah untuk memisahkan diri.
- b). Adanya keseragaman peraturan negara di seluruh wilayah negara sehingga tercipta kesederhanaan hukum.
- c). Penghasilan daerah dapat disebar ke seluruh wilayah negara.

Kerugian-kerugian sistem sentralisasi adalah :

- a). Persoalan negara tidak dapat diselesaikan secara efektif dan efisien, karena semuanya harus diputuskan oleh pemerintah pusat.
- b). Tidak semua peraturan dapat dilaksanakan dengan baik karena kondisi daerah belum tentu sama.
- c). Rakyat di daerah tidak dapat kesempatan untuk menentukan dan bertanggung jawab terhadap daerahnya sendiri (tidak sesuai dengan perkembangan demokrasi).

2. Negara Kesatuan Dengan Sistem Desentralisasi

Penerapan dari sistem ini, pemerintah pusat tidak memegang seluruh kekuasaan pemerintahan, sebagian kekuasaan negara diberikan kepada daerah-daerah, dengan tujuan agar daerah dapat menentukan dan bertanggung jawab terhadap daerahnya sendiri, dengan demikian pemerintah pusat hanya menentukan urusan yang bersifat penting dan umum. Urusan yang menjadi kepentingan daerah dapat diatur oleh daerah sendiri, asal tidak bertentangan dengan peraturan perundangan pemerintah pusat. Daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri disebut daerah otonom.

B. Negara Serikat (Negara Federal)

Negara serikat merupakan gabungan dari beberapa negara bagian, dengan kedaulatan penuh ada pada gabungan dari negara-negara bagian itu. Negara serikat memiliki ciri-ciri sebagai berikut¹² :

- 1). Ada negara dalam negara.
- 2). Kedaulatan ekstern berada ditangan pemerintah pusat / pemerintah federal.
- 3). Kedaulatan intern berada ditangan pemerintah negara bagian.
- 4). Terdapat dua macam konstitusi yaitu konstitusi negara federal dan konstitusi negara bagian.

¹² *Ibid*, hlm. 4.

4. Perbedaan Sistem Parlemerter dan Sistem Presidensiil

a. Sistem Parlemerter :

Ciri-ciri dasar dari sistem parlemerter adalah¹³:

- 1). Parlemen merupakan satu-satunya badan yang anggotanya dipilih secara langsung oleh warga negara yang berhak memilih melalui pemilihan umum.
- 2). Anggota dan pemimpin kabinet (perdana menteri) dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan eksekutif. Sebagian besar atau seluruh anggota kabinet juga menjadi anggota parlemen sehingga mereka memiliki fungsi ganda yaitu sebagai legislatif dan eksekutif. Hal ini berarti yang memegang pemerintahan adalah partai yang memenangkan pemilihan umum atau koalisi partai-partai manakala tidak ada satu partai yang mencapai suara mayoritas.
- 3). Kabinet dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan dari parlemen. Hal ini berarti parlemen dapat menjatuhkan kabinet manakala dari kelompok anggota tidak mendapat dukungan mayoritas dalam DPR.
- 4). Manakala kebijakannya tidak mendapat dukungan dari parlemen, perdana menteri dapat meminta presiden untuk membubarkan parlemen, kemudian menetapkan waktu penyelenggaraan pemilihan umum untuk membentuk parlemen baru (menurut UUD 1950, lamanya 30 hari).

¹³ A.K. Pringgodigdo, *Kedudukan Presiden Menurut Tiga UUD Dalam Teori dan Praktek*, Djakarta, Pembangunan, 1956, hlm. 27.

5). Fungsi kepala pemerintahan (perdana menteri) dan kepala negara (presiden / raja) dilaksanakan oleh orang yang berlainan.

b. Sistem Presidensiil

Ciri-ciri dasar dari sistem presidensiil adalah¹⁴ :

- 1) Kepala pemerintahan disebut presiden dan dipilih untuk masa jabatan yang ditentukan oleh UUD dan dalam keadaan normal tidak dapat dipaksa untuk mengundurkan diri oleh badan legislatif (meskipun terdapat kemungkinan untuk memecat seorang presiden dengan proses pendakwaan luar biasa).
- 2) Kepala pemerintahan presidensial dipilih oleh rakyat baik secara langsung atau melalui badan pemilihan, dan perdana menteri dipilih oleh badan legislatif.
- 3) Memiliki eksekutif nonkolegal (1 orang)

5. Pemerintahan Kabinet.

Pemerintahan kabinet adalah pemerintahan melalui kementerian eksekutif yang dipilih melalui kekuasaan tertinggi dari mayoritas legislatif bertindak sebagai komite eksekutifnya, mengarahkan kerja perdebatannya, mewakili partai yang sama dan prinsip-prinsip yang sama terikat oleh rasa tanggung jawab dan loyalitas terhadap partai dan dapat dibubarkan kapan saja apabila kementerian kehilangan kepercayaan dan dukungan dari badan yang

¹⁴ Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan Parlementer Dan Presidensiil Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1995, hlm. 5.

diwakilinya. Pemerintahan kabinet merupakan sistem pemerintahan yang paling sederhana.¹⁵

6. Tugas Pemerintahan.

Tugas pemerintahan adalah menyelenggarakan kekuasaan eksekutif, kesejahteraan Indonesia dan teristimewa berusaha supaya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain dijalankan (pasal 82 UUDS.RI).

7. Macam-macam kabinet.

a. Kabinet Presidensiil.

Kabinet Presidensiil adalah kabinet di mana pertanggungjawaban atas kebijaksanaan pemerintahan dipegang oleh presiden sendiri. Presiden merangkap memegang jabatan perdana menteri, para menteri tidak bertanggung jawab langsung kepada DPR melainkan kepada presiden. Menteri-menteri dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada presiden, oleh karena itu kedudukan menteri-menteri hanyalah sebagai pembantu presiden saja.

b. Kabinet Parlemènter.

Kabinet Parlemènter adalah suatu kabinet yang dibentuk dengan memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara yang hidup di dalam parlemen dan bertanggungjawab kepada parlemen.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 75.

c. Kabinet Koalisi.

Kabinet Koalisi adalah kabinet yang anggota-anggotanya terdiri atas beberapa partai yang bersama-sama mempunyai wakil yang duduk dalam DPR yang jumlahnya lebih dari separuh anggota DPR seluruhnya.

d. Kabinet Ministeriil.

Kabinet Ministeriil adalah kabinet yang dalam menjalankan kebijaksanaan pemerintahan baik seorang menteri secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama seluruh anggota kabinet bertanggung jawab kepada DPR.¹⁶

8. Definisi Partai Politik

- a. Secara umum dapat dikatakan partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.¹⁷
- b. Carl J. Friedrich berpendapat partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.¹⁸
- c. R.H. Soltav berpendapat partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.¹⁹

¹⁶ C.S.T. Kansil, *op.cit.*, hlm. 111.

¹⁷ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 1991, hlm. 160.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 161.

¹⁹ *Ibid*.

d. Sigmund Neumann berpendapat partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan yang mempunyai pandangan yang berbeda.²⁰

9. Klasifikasi partai.

a. Dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaanya²¹ :

- 1) Partai Masa : Mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, oleh karena itu biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat untuk bernaung di bawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak lebar. Kelemahan : masing-masing aliran atau kelompok yang bernaung di bawah partai masih cenderung untuk melaksanakan kepentingan masing-masing terutama pada saat-saat kritis, sehingga persatuan dalam partai dapat menjadi lemah atau hilang sama sekali sehingga salah satu golongan memusatkan diri dan mendirikan partai baru.
- 2) Partai Kader : Mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang ditetapkan.

²⁰ *Ibid*, hlm. 162.

²¹ *Ibid*, hlm. 166.

b. Dilihat dari segi sifat dan orientasi²² :

1) Partai Lindungan (*patronage party*) : Umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor (sekalipun organisasinya di tingkat lokal sering cukup ketat), disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Maksud utama ialah memenangkan pemilihan umum untuk anggota-anggota yang dicalonkannya, karena itu hanya giat menjelang masa-masa pemilihan.

Contoh : Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika Serikat

2) Partai Ideologi / Partai Azas : Mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat. Terhadap calon anggotanya diadakan saringan, sedangkan untuk menjadi anggota pimpinan disyaratkan lulus melalui beberapa percobaan.

10. Fungsi partai-partai dalam negara demokrasi²³ :

a. Sebagai sarana komunikasi politik.

Arus informasi dalam suatu negara bersifat dua arah artinya berjalan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kedudukan partai dalam arus ini adalah sebagai jembatan antara mereka yang memerintah (*the rulers*) dengan mereka yang diperintah (*the ruled*). Proses dimana seseorang memperoleh pandangan orientasi dan nilai-nilai dari masyarakat dimana ia

²² *Ibid*, hlm. 166 – 167.

²³ *Ibid*, hlm. 49.

berada, proses itu juga mencakup proses dimana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.

b. Sebagai sarana sosialisasi politik.

Proses dimana seseorang memperoleh pandangan orientasi dan nilai-nilai dari masyarakat dimana ia berada, proses itu juga mencakup proses dimana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.

c. Sebagai sarana rekrutmen politik.

Rekrutmen politik adalah proses dimana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

d. Sebagai sarana pengatur konflik.

Negara demokrasi masyarakatnya bersifat terbuka. Adanya perbedaan dan persaingan merupakan hal yang wajar.

11. Dalam sistem politik terdapat 4 variabel yaitu²⁴ :

a. Kekuasaan

Sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan antara lain membagi sumber-sumber di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

b. Kepentingan

Tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik.

c. Kebijaksanaan.

Hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk undang-undang.

²⁴ *Loc.cit.*, hlm. 49.

d. Budaya Politik.

Orientasi subyektif dari individu terhadap sistem politik.

12. Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah *rule of law* ialah²⁵ :

- a. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain dari menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*).
- c. Pemilihan umum yang bebas.
- d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
- e. Kebebasan untuk berserikat / berorganisasi dan beroposisi.
- f. Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

G. Metodologi dan Pendekatan.

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses disebut historiografi. Dengan mempergunakan metode sejarah dan historiografi, sejarawan berusaha merekonstruksi sebanyak-banyaknya dari masa lampau.²⁶

²⁵ *Ibid*, hlm. 60.

²⁶ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Jakarta, UII Press, 1988, hlm. 32.

Langkah-langkah penulisan yang diterapkan dalam metode sejarah mencakup pokok-pokok sebagai berikut :

1. Heuristik atau penemuan sumber.
2. Kritik sumber, terdiri dari dua macam, yaitu
 - a. Kritik eksternal (otensitas/kesejatian sumber)
 - b. Kritik internal (isi sumber)
3. Analisa sumber yaitu penguraian informasi dengan relasinya satu dengan yang lain.
4. Sintesis sumber yaitu pemanduan dan perbandingan informasi dari berbagai sumber.
5. Koroborasi yaitu pengukuhan informasi.
6. Historiografi yaitu penulisan sejarah sehingga menghasilkan kisah dan kegiatan.

Tujuan penelitian *history* adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan data, memverifikasikan, serta mensintesisakan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.²⁷ Penelitian historis tergantung pada dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber primer yaitu si peneliti (penulis) secara langsung melakukan observasi atau menyaksikan kejadian-kejadian yang dituliskan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber sekunder. Sumber sekunder adalah peneliti melaporkan hasil observasi orang lain satu kali atau lebih telah lepas dari kejadian asalnya.

²⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, C.V. Rajawali, 1983, hlm. 16.

Sehubungan dengan penulisan ilmiah, maka penulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode ini digunakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki. Dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta atau data-data sebagaimana adanya. Data atau fakta yang relevan yang ditampilkan kemudian dikupas sehingga sasaran tercapai.²⁸

Data sejarah yang dipergunakan adalah data-data dari buku-buku atau pustaka, dimana merupakan data sekunder. Data sekunder pada umumnya tidak luput dari unsur subyektivitas pengarangnya. Sehubungan dengan kelemahan itu, maka data sekunder tersebut diseleksi dan diinterpretasikan sebaik mungkin. Untuk menguji bobot data dilakukan dua macam kritik internal dan kritik eksternal.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik dan psikologis. Dengan pendekatan politik dimaksudkan untuk mengetahui kehidupan politik pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamijoyo II. Pendekatan psikologis digunakan untuk mengetahui karakter Ali Sastroamijoyo yang melatarbelakangi pemikiran dan tindakan Ali Sastroamijoyo dalam mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam pemerintahannya. Karakter atau sikap Ali Sastroamijoyo merupakan suatu akumulasi dari perjalanan dan pandangan dirinya terhadap situasi jamannya, sehingga dapat dikatakan bahwa

²⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1990, hlm. 63.

situasi (histories) dapat menimbulkan interpretasi seseorang dan membentuk sikap seseorang dari situasi zaman.²⁹

Melalui kedua pendekatan ilmu yang digunakan dalam penelitian ini maka akan dapat menghasilkan karya penulisan yang bersifat deskriptif analisis. Melalui pendekatan psikologis dan politik ini bertujuan agar gejala-gejala sejarah dapat ditampilkan dan gambaran tentang peristiwa sejarah menjadi bulat dan menyeluruh sehingga dapat menghindari kesepihakan determinisme.³⁰

Penulisan skripsi ini termasuk penelitian kualitatif dengan cara studi pustaka. Penulis memilih metode deskripsi analisis karena data-data yang mendukung proses rekonstruksi sebagian besar dalam bentuk pernyataan. Studi pustaka menjadi sebuah pilihan yang cukup rasional mengingat masa pemerintahan Ali Sastroamijoyo adalah pada tahun 1956–1957. Melalui studi pustaka, penulis berusaha mencari data-data yang didokumentasikan secara tertulis yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan topik yang diambil.

H. Sistematika Penulisan.

Bab I : Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tinjauan sumber, landasan teori, metodologi dan pendekatan dan sistematika penulisan.

Bab II : Pembahasan dari masalah pertama yaitu proses pembentukan kabinet Ali Sastroamijoyo II.

²⁹ Robert F. Berkhofer JR, *A Behavioral Approach To Historical Analysis*, New York, The Free Press, 1971, hlm. 40.

³⁰ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm. 87.

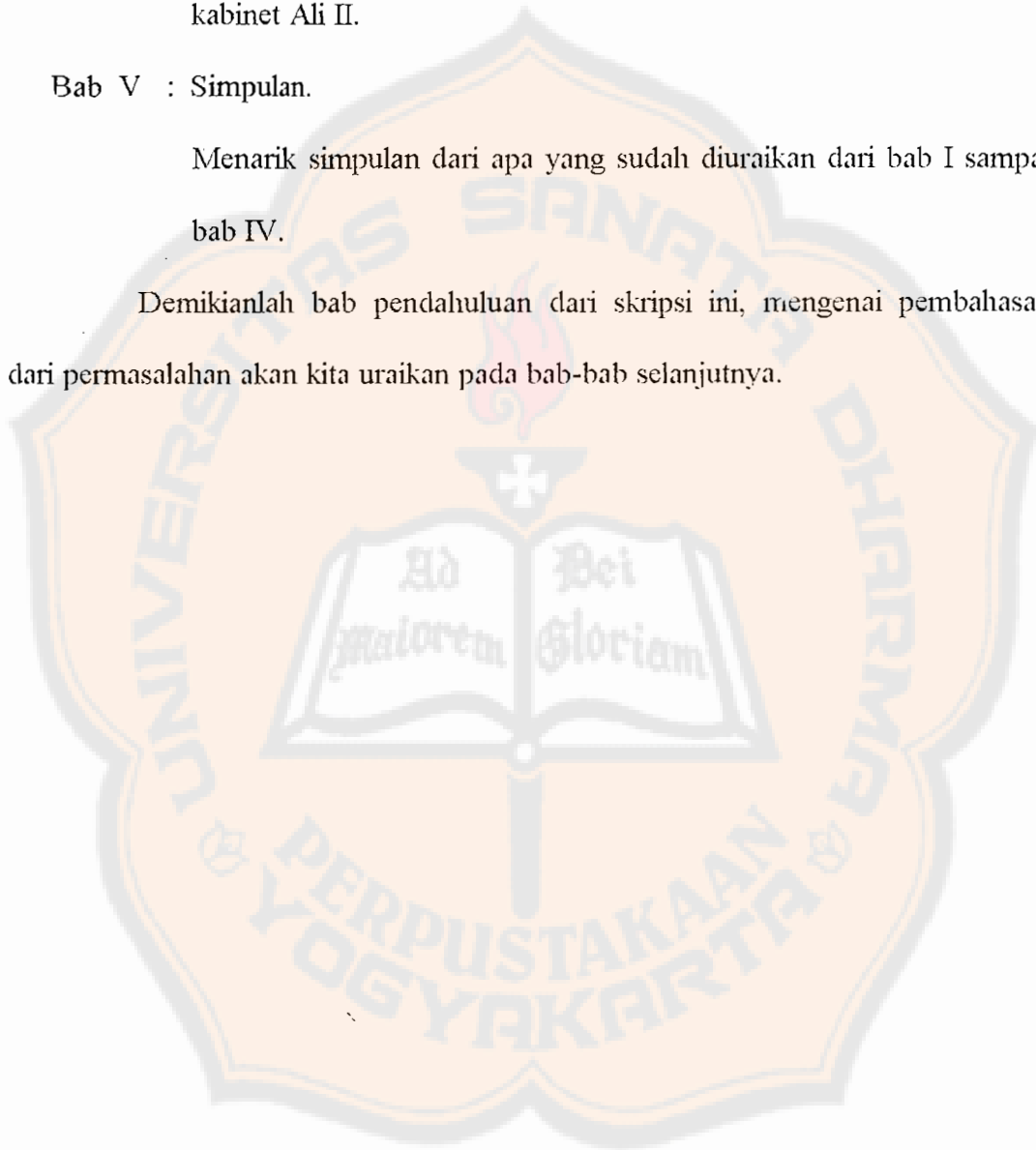
Bab III : Pembahasan dari masalah yang kedua yaitu program dan pelaksanaan kerja kabinet Ali Sastroamijoyo II.

Bab IV : Pembahasan dari masalah yang ketiga yaitu sebab-sebab kejatuhan kabinet Ali II.

Bab V : Simpulan.

Menarik simpulan dari apa yang sudah diuraikan dari bab I sampai bab IV.

Demikianlah bab pendahuluan dari skripsi ini, mengenai pembahasan dari permasalahan akan kita uraikan pada bab-bab selanjutnya.



BAB II
PROSES PEMBENTUKAN
KABINET ALI SASTROAMIJOJO II

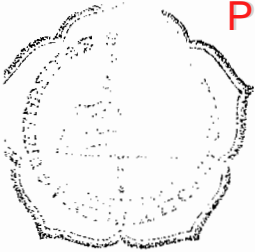
A. Biografi Ali Sastroamijoyo

Ali Sastroamijoyo dilahirkan di Grabag Merbabu yang terletak di bawah lereng Gunung Merbabu pada tanggal 21 Mei 1903. Masa kecil Ali dihabiskan di Magelang dan mengenyam pendidikan sekolah dasar pada sekolah Belanda (*Eerste Europese Lagere School*) di Magelang.

Pada tahun 1918, Ali Sastroamijoyo masuk H.B.S. atas anjuran kakaknya Sastrowidjono. Di Jakarta, Ali memulai kehidupan baru dan banyak mengenal teman-teman yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Ambon, Sumatera dan Nusa Tenggara. Disini Ali aktif dalam perkumpulan pelajar Jong Java sebab dalam perkumpulan itu perasaan cinta daerah dipupuk agar lebih subur. Di sekolah H.B.S. inilah Ali mulai mengenal kebudayaan Barat terutama Belanda.

Dalam proses menuju kedewasaan, Ali tumbuh dalam pengaruh budaya Barat dan Timur. Disini Ali banyak mempelajari budaya dan bahasa Belanda. Pada tahun 1922, Ali lulus dari H.B.S. dengan nilai yang memuaskan.

Setelah menyelesaikan sekolah di H.B.S., Ali kemudian melanjutkan ke Universitas Leiden di Belanda dan mengambil jurusan Hukum Hindia Belanda di Fakultas Hukum.



Untuk mengasah bakat politiknya, Ali menjadi anggota Perhimpunan Indonesia yang pada saat itu dikenal dengan nama *Indonische Vereniging*. Disinilah muncul semangat nasionalisme Ali yang membuat dia semakin aktif terjun dibidang politik.

Pada tahun 1925, *Indonesische Vereniging* yang diketuai oleh Dr. Sukiman Wirjosandjodjo diganti dengan nama Perhimpunan Indonesia. Ali bersama mahasiswa yang lain terlibat aktif untuk menulis dan mengisi majalah Indonesia yang dikenal dengan nama Indonesia Merdeka. Majalah tersebut kemudian dikirim ke Indonesia agar mahasiswa yang ada di Indonesia bertambah nasionalisme-nya dan mau berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada tahun 1928, Ali menyelesaikan kuliahnya dan kembali ke Indonesia tepatnya di kota Yogyakarta. Di Yogyakarta Ali membuka praktek sebagai pengacara dan aktif di PNI. Ali aktif di PNI karena PNI dianggap mempunyai tujuan yang sama dengan Perhimpunan Indonesia yaitu Indonesia Merdeka. Selain menjadi pengacara, Ali juga mengajar di Taman Siswa atas dukungan Ki Hadjar Dewantara.

Hubungan Ali dengan PNI semakin erat dan Ali semakin aktif, bahkan kerap ikut pertemuan di Bandung dan Jakarta. Disinilah Ali bertemu dengan Bung Karno, Sartono, Gatot Mangkupraja dan saling beradu argumen. Ali juga terlibat untuk terjun ke daerah pedesaan untuk membina kader-kader PNI yang ada di daerah. Untuk menunjang karirnya, Ali juga aktif di kalangan PPPKI (Permusyawaratan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia).

Organisasi ini memiliki dasar persatuan nasional yang program utamanya adalah mengadakan aksi bersama dibidang politik.

Sejalan dengan perkembangan waktu, maka pada pertengahan tahun 1930, Ali pindah ke Surabaya dan menjadi direktur majalah PBI yang bernama Suluh, atas permintaan Dr. Soetomo (PBI), tetapi Ali merasa tidak cocok dan kemudian mundur. Untuk sementara Ali menetap di Madiun sebagai pengacara.

Pada bulan April 1945, Ali pindah ke Jakarta dan bekerja di kantor Tabungan Pos dan menjabat sebagai kepalanya. Setelah Indonesia merdeka, Ali tetap aktif dalam pergerakan kebangsaan.

Pada tanggal 2 September 1945 kabinet pertama di Indonesia dibentuk dan Ali dipilih sebagai pegawai tinggi dalam kementerian penerangan. Pada bulan Juni 1946 sampai Juli 1947 Ali menjabat dewan pertahanan negara. Pada masa pemerintahan kabinet Amir Syariffudin, Ali menjadi menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Pada masa kabinet presidensiil di bawah pimpinan Bung Hatta, pada tanggal 29 Juni 1948, Ali tetap sebagai menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan agresi militer II, Ali bersama menteri-menteri yang lain diasingkan ke Bangka. Setelah bebas Ali kembali ke Yogyakarta.

Pada bulan Agustus 1949, Ali bersama Mr. Soejono Hadinoto berangkat ke Den Haag untuk ikut serta dalam perundingan KMB. Pada permulaan tahun 1950, Ali ditugaskan menjabat sebagai duta besar Indonesia yang pertama kali di Washington D.C., Amerika Serikat. Walaupun telah tinggal di luar negeri, Ali masih aktif di PNI dan pada tahun 1953 ia diangkat menjadi perdana menteri yang

kemudian memimpin kabinet yang dikenal dengan nama kabinet Ali I. Setelah kabinet Ali I mundur dan segera diganti dengan kabinet Burhanudin Harahap. Setelah kemunduran kabinet Burhanudin Harahap, untuk kedua kalinya Ali diberi kesempatan untuk membentuk kabinet yaitu kabinet Ali II.

B. Sejarah Terbentuknya Kabinet Ali II

Dalam kehidupan dan percaturan politik nasional, Presiden Soekarno merupakan bapak nasional. Presiden Soekarno memiliki kharisma sehingga orang-orang segan dan taat padanya. Hal inilah yang menjadikan politik di Indonesia pada tahun 1950-an berkembang. Perkembangan ini tidak lepas dari pengaruh Soekarno sebagai presiden Republik Indonesia.

Indonesia sejak kembali ke bentuk kesatuan memakai sistem pemerintahan parlementer. Menurut sistem pemerintahan parlementer ini, sistem pemerintahan didasarkan pada UUDS 1950 yang menyatakan bahwa kepala negara (presiden) tidak dapat diganggu gugat dan tidak mempunyai tanggung jawab pemerintahan, karena kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri yang bertanggung jawab pada parlemen. Susunan personalia serta program kabinet didasarkan kepada suara terbanyak di dalam parlemen, dan kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen setiap waktu dengan suara terbanyak, dan sebaliknya parlemen juga dapat dibubarkan oleh pemerintah setiap waktu. Presiden dan kaum militer merupakan kekuatan politik yang sifatnya ekstra parlementer dengan kekuasaan yang terbatas.¹

¹ Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik Indonesia 1945-1966*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1982, hlm. 68.

Tahun 1950-an, sistem pemerintahan di Indonesia tidak stabil, ini ditandai dengan jatuh banggunya kabinet pada masa itu. Jatuh banggunya kabinet ini disebabkan berbagai faktor, baik faktor dalam negeri maupun luar negeri. Ketegangan politik menyelimuti pemerintah Indonesia. Partai-partai saling menunjukkan ideologi dan kekuatan masing-masing untuk menduduki pemerintahan. Hal inilah yang menyebabkan kurang kompaknya partai satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan persaingan yang kurang sehat. Akibat pertentangan antar partai, kabinet jatuh bangun sehingga tidak pernah berumur panjang. Partai politik menggunakan surat kabar maupun DPR untuk menyscrang tiap kebijakan pemerintah.

Iklim politik tahun 1950-an memang sangat memungkinkan orang untuk mengembangkan organisasi politik dan kemasyarakatan. Setelah proklamasi kemerdekaan banyak ditandai dengan perjuangan macam-macam organisasi dari berbagai kepentingan. Adanya persaingan politik antar partai memperuncing keadaan yang memang sudah panas dan perselisihan juga timbul dalam tubuh ABRI. Kabinet Ali II mencoba untuk masuk ke dalam suasana tersebut dengan mengadakan pendekatan-pendekatan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Perseteruan antara partai politik dan ABRI ini memang sudah ada sejak kabinet Ali I.

Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah suatu mata rantai yang kritis dalam proses perkembangan politik pada tahun 1950-an, yang oleh Presiden Soekarno disebut masa panca kritis yaitu keadaan resah para pejuang kemerdekaan yang mencari pegangan hidup kembali, karena makin terasa *disparitas* antara

perjuangan dan kenyataan. Dan adalah logis bila setelah masa gerilya, rakyat mempunyai harapan bahwa keadaan akan lebih baik dan dapat memulai mengisi kemerdekaan untuk menuju keadilan dan kemakmuran.²

Kondisi politik sesudah KMB belum stabil, RI berubah menjadi RIS dan kemudian menjadi negara kesatuan berdasarkan UUDS 1950, sehingga mengakibatkan tidak terbinanya konsistensi perjuangan. Keadaan tahun 1950-an ini dirasakan membawa kita jauh dari harapan, sebab³ :

- a. Ketegangan politik yang makin menajam, penyelesaian tata konstitusi yang berlarut-larut, perpecahan dalam kepemimpinan nasional, dan lain-lain.
- b. Keadaan sosial-ekonomi yang makin merosot, dan korupsi yang makin meluas.
- c. Keadaan keamanan yang semakin memburuk dan harapan pembebasan Irian Barat yang semakin jauh.
- d. Pergolakan intern ABRI dan intern partai-partai semakin hebat, dibarengi kemerosotan integritas dan kemampuan aparatur pemerintah.

Maka adalah hal biasa, bila rakyat mencari identitas bangsa yang sewajarnya, yang pada hakikatnya mencari sistem kenegaraan yang lebih sesuai dimana masyarakat akan lebih berkesempatan secara dinamis untuk mengejar cita-cita agar tercapai kesejahteraan sosial.

Setelah kabinet Burhanudin Harahap resmi meletakkan jabatan pada tanggal 2 Maret 1956, Presiden Soekarno menunjuk Ali Sastroamijoyo sebagai

² A.H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 3*, Jakarta, Gunung Agung, 1983, hlm.149.

³ *Ibid.*

formatur kabinet baru. Ali Sastroamijoyo berhasil menyusun kabinetnya dalam tempo 8 hari. Kabinet Ali Sastroamijoyo II didasarkan atas PNI, Masymi dan NU. Beberapa kedudukan juga diberikan pada PSII, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Perti. Kabinet ini juga mengikutsertakan seorang menteri non-partai, Djuanda, seorang tokoh politik kawakan dari suku Sunda, yang mendapat kepercayaan dari Presiden Soekarno. Dalam kabinet ini, Ali Sastroamijoyo sendiri menjadi perdana menteri dan merangkap menteri pertahanan.⁴

Kabinet Ali Sastroamijoyo II resmi terbentuk tanggal 8 Maret 1956 atas persetujuan Presiden Soekarno. Pembentukan kabinet Ali Sastroamijoyo II ini berjalan lancar, karena situasi dan kondisi pada waktu itu cukup tenang. Pada tanggal 16 Maret 1956, Ali Sastroamijoyo menghadap Presiden Soekarno untuk melaporkan hasil pembentukan kabinet baru. Ali Sastroamijoyo selaku perdana menteri mulai menyusun program kerja dan susunan kabinetnya. Tetapi setelah program kerja dan susunan kabinet tersebut disusun, Presiden Soekarno kecewa atas program kerja dan susunan kabinet yang disusun oleh kabinet Ali Sastroamijoyo II. Perdana Menteri Ali mencoba meyakinkan Presiden Soekarno bahwa program kerja dan susunan kabinet yang telah disusun tersebut adalah sesuai dengan keadaan dan situasi politik Indonesia saat itu.

Presiden Soekarno tidak langsung menyetujui program kerja dan susunan kabinet Ali Sastroamijoyo II ini. Presiden Soekarno perlu waktu untuk mempertimbangkan program kerja dan susunan kabinet tersebut. Presiden

⁴ Ulv Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967*, Jakarta, LP3ES, 1986, hlm. 169.

Soekarno kecewa karena Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo tidak memasukkan PKI dalam kabinetnya, padahal PKI merupakan partai yang besar.

PKI mendesak Ali Sastroamijoyo untuk memasukkan simpatisan PKI dalam kabinet, seperti Sadjarwo dari BTI sebagai menteri negara untuk urusan transmigrasi, A.M. Hanafi, sekretaris jendral kongres rakyat Indonesia, sebagai menteri muda perburuhan dan Ir. Purbodiningrat, seorang aristokrat Yogyakarta, pimpinan veteran panitia perdamaian aliran PKI dan kandidat PKI dalam pemilihan parlemen sebagai menteri negara hubungan urusan dalam parlemen.

Ali Sastroamijoyo menolak semua calon ini sebelum dia mengambil daftar susunan anggota-anggota kabineinya dari Presiden Soekarno. Presiden Soekarno menanyakan pada Ali untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Presiden Soekarno menganjurkan pada Ali agar memasukkan orang-orang PKI dalam kabinetnya, karena PKI merupakan partai besar dan pantas bila orang-orang PKI juga berperan serta dalam kabinet Ali Sastroamijoyo II.

Presiden Soekarno memang bersimpati pada PKI, hal ini disebabkan karena Presiden Soekarno kecewa pada PNI yang tidak mendukungnya dalam kongres seluruh Indonesia. Dalam pidatonya yang dibuat setelah pemilihan parlemen, Presiden Soekarno menekankan untuk memasukkan empat partai besar dalam kabinet sebagai suatu yang sangat perlu bagi persatuan nasional.

Anjuran Presiden Soekarno untuk memasukkan PKI mendapat tentangan dari NU dan Masyumi. NU dan Masyumi tidak akan ikut dalam kabinet apabila Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo memasukkan empat kandidat PKI dalam kabinet. Pernyataan dari Masyumi dan NU ini mendapat dukungan dari Ir.

Djuanda. Ir. Djuanda bukanlah kandidat dukungan PKI, tetapi dia adalah seorang yang ditempatkan presiden dengan kepercayaan luar biasa dan oleh sebab itu, hal ini merupakan situasi yang teraman.⁵

Adapun alasan PNI menolak berkoalisi dengan PKI adalah⁶ :

- a. Koalisi nasionalis-Islam sudah menguasai suara lebih dari cukup di DPR.
- b. Partai-partai Islam tentu tidak mau berkoalisi dengan kaum Komunis.
- c. Kalau PKI turut serta didalam pemerintahan pusat, partai Komunis niscaya akan mengembangkan lebih lanjut kemenangan yang diperolehnya dalam pemilihan umum.

Dalam proses pembentukan kabinet Ali Sastroamijoyo II ini, ada konflik-konflik yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum persetujuan susunan kabinet dicapai. Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo merencanakan untuk tidak memasukkan seorangpun yang telah menjadi anggota kabinet Burhanudin Harahap. Ali juga merintis berposisi terhadap kandidat Roem yang telah diberi status menteri kehormatan sebagai anggota delegasi Anak Agung yang bernegosiasi dengan Belanda, tetapi kemudian Roem diterima sebagai wakil perdana menteri pertama pada kabinet Ali Sastroamijoyo II.⁷

Kabinet Ali Sastroamijoyo II sebagian besar terdiri dari orang-orang politik yang cukup moderat, bahkan ada yang sudah diakui kompetensi teknisnya. Program-program yang dibuat oleh kabinet Ali Sastroamijoyo II ini sangat terinci dengan baik yang terdiri dari tujuan-tujuan jangka panjang. Program-program

⁵ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, New York, Cornell University Press, 1962, hlm. 469.

⁶ Ali Sastroamijoyo, *Tonggak-tonggak di Perjalananku*, Jakarta, P.T. Kinta, 1974, hlm. 340.

⁷ Herbert Feith, *op.cit.*, hlm. 467.

yang dibuat lebih ditekankan pada masalah ekonomi, karena masalah ekonomi Indonesia saat itu sangat memprihatinkan. Perbaikan ekonomi ini menjadi fokus utama karena merupakan masalah dalam negeri dan harus cepat-cepat ditanggulangi agar rakyat dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Untuk mewujudkan program-program yang sudah dibuat, maka pada tanggal 20 April 1956 kabinet Ali II diberi kesempatan untuk bekerja oleh parlemen baru secara utuh.

Proses pembentukan kabinet Ali II bisa dianggap berjalan lancar walaupun ada konflik dalam negeri dan luar negeri. Masalah-masalah itu tidak menjadi hambatan bagi pemerintahan Ali II untuk maju guna mencapai tujuan yang sudah dicita-citakan yaitu menjadikan rakyat Indonesia hidup makmur, bebas korupsi, ekonomi membaik serta meningkatnya kepercayaan rakyat pada pemerintah.

Dengan latar belakang pengalaman kabinet-kabinet sebelumnya maka kabinet Ali II mencoba memulihkan keadaan negara dan ingin mewujudkan program-program kerja yang sudah dibuat. Pada era tahun 1950-an ini memang sangat memungkinkan untuk mengembangkan organisasi, apalagi setelah tahun 1955 jumlah partai di Indonesia semakin bertambah sampai 28 buah. Hal ini disebabkan oleh sistem pemerintahan yang terlalu demokratis. Partai yang terbesar saat itu adalah PNI, Masyumi dan NU.

Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo berusaha untuk menjalankan kabinetnya sesuai dengan program-program yang telah disusun. Ketika Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo memulai pekerjaannya, keputusan terpenting telah siap

dibuat bagi dia dan PNI. Kabinet lebih didasarkan pada koalisi PNI-Masjumi-NU daripada kombinasi PNI-NU yang disokong oleh partai komunis.⁸

Ali mempunyai keyakinan bahwa kabinetnya yang kedua ini akan sukses. PNI, Masjumi dan NU diharapkan dapat bekerja sama dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dibebankan. Demikianlah sebuah kabinet yang sudah dibentuk oleh Ali dimana PNI adalah satu kepemimpinan dengan Masjumi dan NU yang keduanya sedikit banyak memberi pengaruh pada PNI.

Sejalan dengan lajunya waktu, akhirnya Ali dapat mengatasi perbedaan-perbedaan paham ini, sehingga persetujuan tentang susunan kabinet baru dapat disetujui. ABRI sendiri tidak mau melibatkan diri didalam urusan-urusan politik dan menyerahkan penyelesaian pembentukan kabinet. Sebenarnya dengan persetujuan antara Masyumi, NU dan PNI itu pembentukan kabinet Ali II sudah bisa dianggap berhasil, tetapi untuk lebih memperkuat kedudukan pemerintah maka diikutsertakan pula partai-partai kecil seperti P.S.I.I., Perti, Partai Katolik, PARKINDO, dan IPKI, yang bersama-sama menguasai 30 suara di DPR. Disini PSI tidak diikutsertakan karena jumlah suara 187 di kabinet sudah dianggap cukup kuat kedudukannya. Selain daripada itu, kalau PSI ikut serta dalam kabinet, hal itu akan merusak keseimbangan kekuatan antara Masyumi dan PNI. Adapun Ir. Djuanda, seorang non partai yang diusulkan Ali Sastroamijoyo sebagai menteri negara urusan perencanaan karena keahlian dan pengalamannya sebagai kepala biro perencanaan negara. Hal ini sangat bermanfaat bagi rencana pembangunan lima tahun yang termasuk dalam program kabinet Ali II.

⁸ *Ibid*, hlm. 466.

C. Program Kerja dan Susunan Kabinet Ali Sastroamijoyo II

1. Program Kerja Kabinet Ali Sastroamijoyo II.

Kabinet Ali Sastroamijoyo II ini mencanangkan program kerja yang cukup luas dan berani, sekaligus dapat dicatat sebagai program kerja kabinet hasil pemilu pertama. Sebagai suatu refleksi, Ali Sastroamijoyo menyodorkan program kerja sebagai berikut⁹:

I. PEMBATALAN KMB :

Menjelesaikan seluruh perdjandjian KMB setjara unilateral baik formil maupun materil dan mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung akibatnja.

II. IRIAN BARAT :

- a. Meneruskan perdjjuangan untuk mewujudkan kekuasaan de facto R.I. atas Irian Barat bersandarkan kekuatan rakjat dan kekuatan-kekuatan anti kolonialisme di dunia internasional.
- b. Membentuk propinsi Irian Barat.

III. DALAM NEGERI

1. a. Memulihkan keamanan dalam negeri jang dikatjaukan oleh gerombolan-gerombolan illegal jang memberontak terhadap negara dengan apapun djuga mereka menamakan dirinja.
- b. Menjempurnakan koordinasi antara alat-alat kekuasaan negara terutama dalam tindakan-tindakan pemulihan keamanan.

⁹ Departemen Penerangan, *Susunan dan Program Kabinet Republik Indonesia Selama 25 Tahun 1945-1970*, Djakarta, Pradnja Paramita, 1970, hlm. 19-21.

2. Perekonomian dan Keuangan

A. Perekonomian

- a. Memulai pembangunan setjara teratur dan menurut rentjana berdjangka waktu tertentu (5 tahun) jang ditetapkan dengan Undang-undang dengan menitik beratkan pada dasar keputusan rakjat.
- b. Berusaha untuk mewudjudkan pergantian ekonomi kolonial mendjadi ekonomi nasional bersandarkan kepentingan rakjat djelata, dengan mengutamakan kebutuhanja jang primer.
- c. Mempergiat kepentingan koperasi.
- d. Memadjukan transmigrasi.

B. Keuangan

- a. Menjehatkan keuangan negara hingga tertjapai imbangan anggaran belandja jang baik dan jang memberi kemungkinan untuk melandjutkan pembangunan.
- b. Dalam usaha penjempurnaan keuangan negara, penambahan sumber keuangan baru harus diutamakan.
- c. Memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara.
- d. Perkreditan pemerintah jang dapat dan lantjar untuk melindungi usaha ekonomi nasional terhadap persaingan asing.

C. Perindustrian.

Memajukan berdirinya industri nasional supaya selekas mungkin R.I. dapat mendjamin kebutuhannya sendiri, dan melindungi industri nasional terhadap persaingan asing.

D. Pertanian, Peternakan dan Perikanan.

Mempertinggi tingkat hidup petani dengan djalan :

- a. Memperbanjak produksi hasil bumi, terutama bahan-bahan makanan rakyat dengan memperluas tanah tanamannya diseluruh wilayah RI terutama didaerah luar pulau Djawa, baik setjara intensif maupun setjara extensif.
- b. Mempertinggi tumbuhnya koperasi-koperasitani dan bank-bank tani.
- c. Memajukan kesehatan dan pendidikan dan pengadjaran tani.
- d. Memperlipat-gandakan hasil peternakan dan perikanan.

E. Perhubungan

- a. Memperlengkapi alat-alat transport untuk daerah jang menghasilkan produksi banjak, sehingga tertjapai imbangan jang baik antara produksi dan konsumsi dengan mengutamakan rehabilitasi djalan-djalan diluar djawa.
- b. Memajukan dan mengawasi pelajaran nasional serta melindungi terhadap persangan asing.

F. Agraria

Memperbaharui perundang-undangan agraria berdasar atas kepentingan petani dan rakyat kota.

3. Otonomi dan Organisasi Negara

- a. Melaksanakan pembentukan daerah-daerah otonom dalam tingkat yang sebanjak-banjak tiga, dan yang dilakukan menurut faktor-faktor nyata sosial ekonomi dan kebudayaan dengan memberi jaminan kepada daerah otonom dari tiap-tiap tingkatan minimum tugas-tugas otonom dan medebewind, dengan jaminan minimum perlengkapan aparatur dan keuangan.
- b. Menetapkan dengan undang-undang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, yang dapat memenuhi kepentingan daerah otonom dengan mengingat perkembangannya.
- c. Menjejerakan adanya pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Menjusun aparatur pemerintah yang efisien serta pembagian tenaga yang rasionil dengan mengusahakan perbaikan kehidupan pegawai.
- e. Memberantas korupsi setjara objektif tanpa memandang bulu berdasarkan hukum

4. Pertahanan

- a. Melantjarkan tertjapainya stabilisasi kekuasaan negara.
- b. Mengadakan kewadajiban milisi bagi semua warga-negara menurut syarat-syarat yang ditentukan dengan undang-undang.
- c. Memperbaiki nilai-nilai teknis pendidikan rohani dan djasmani militer dari Angkatan Perang Republik Indonesia, sehingga nilai perdjuangannya dipertinggi.

5. Perburuhan

Mewujudkan usaha pemerintah kearah perbaikan nasib dan kedudukan kaum buruh dan pegawai negeri serta hubungannja dengan pimpinan perusahaan atau djawatan hingga berkesempatan memperkembangkan bakat dan sifat-sifatnja jang baik untuk kepentingan masjarakat. Melengkapkan perundang-undangan perburuhan dan kepegawaian. Mengatur penyelesaian perselisihan perburuhan melalui prosedur jang lebih demokratis, sambil menudju kearah peradilan perburuhan jang lengkap. Memberikan segala bantuan dan stimulasi bagi konsolidasi dan pertumbuhan organisasi-organisasi kaum buruh dan pegawai yang sehat.

6. Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan

Memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan rakjat di sekolah dan di luar sekolah baik djasmani maupun rohani atas dasar kepentingan nasional sekarang.

- a. Menjiapkan berlakunja wadajib beladjar dalam tempo jang tertentu.
- b. Memperluas pendidikan tehnik dan ekonomi jang praktis dan umumnja pendidikan kedjuruan, sesuai dengan kepentingan pembangunan sekarang.
- c. Menjelesaikan perundang-undangan pendidikan nasional hingga tertjapai dasar jang sama dan koordinasi jang baik di seluruh lapangan pendidikan dari sekolah rendah sampai sekolah tinggi.
- d. Menjelenggarakan usaha-usaha jang pokok dan merata untuk memberi dasar jang kuat dalam pertumbuhan kebudajaan nasional.

7. Soal Veteran

Menjalurkan tenaga veteran kearah usaha-usaha produktif

8. Agama

Menjegerakan terbentuknja undang-undang pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah agama.

9. Hal-hal lain

Menjegerakan terbentuknja perundang-undangan perkawinan.

IV. LUAR NEGERI:

- a. Mendjalankan politik luar negeri jang bebas dan aktif berdasarkan kepentingan rakjat dan menudju ke perdamaian dunia.
- b. Meneruskan kerdja-sama dengan negara-negara Asia-Afrika dan melaksanakan keputusan-keputusan konperensi Asia-Afrika pertama di Bandung.

2. Susunan Kabinet Ali Sastroamijoyo II.

Pada tanggal 9 Maret 1956 diadakan perundingan dengan partai-partai untuk membahas tentang susunan kabinet Ali Sastroamijoyo II. Antar partai timbul perbedaan pendapat. Contohnya usul Masyumi untuk mengangkat Burhanudin Harahap sebagai menteri kehakiman, tetapi usul ini ditolak oleh Ali Sastroamijoyo. Dengan kebijakan yang dibuat oleh Ali, akhirnya perbedaan-perbedaan itu dapat diatasi. Pada tanggal 16 Maret 1956, Ali Sastroamijoyo menghadap Presiden Soekarno untuk melaporkan susunan kabinetnya. Adapun susunan kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah sebagai berikut¹⁰:

¹⁰ *Ibid*, hlm. 19.

Jabatan	Nama	Partai
Perdana Menteri	Mr. Ali Sastroamijoyo	PNI
Wakil Perdana Menteri I	Mr. Moh. Roem	Masjumi
Wakil Perdana Menteri II	K.H. Idham Chalid	NU
Menteri Luar Negeri	H. Roeslan Abdulgani	PNI
Menteri Dalam Negeri	Mr. Soenarjo	NU
Menteri Pertahanan a.i	Mr. Ali Sastroamijoyo	PNI
Menteri Kehakiman	Prof. Mr. Muljatno	Masjumi
Menteri Penerangan	Sudibjo	PSII
Menteri Keuangan	Mr. Jusuf Wibisono	Masjumi
Menteri Perekonomian	Mr. Burhanuddin	NU
Menteri Muda Perekonomian	F.E. Umbas	PARKINDO
Menteri Pertanian	Eny Karim	PNI
Menteri Muda Pertanian	Sjech Marhaban	PSII
Menteri Perhubungan	II. Suchjar Tedjasukmana	Masjumi
Menteri Muda Perhubungan	A. BL. De Rojari	Katolik
Menteri P. U.& T.	Ir. Pangeran Moh. Nur	Masjumi
Menteri Agraria	Prof. Mr. A.A. Suhardi	Katolik
Menteri Sosial	KH. Fatah Jasin	NU
Menteri Perburuhan	Sabilal Rasjad	PNI
Menteri P.P.& K.	Sarino Mangunpranoto	PNI
Menteri Kesehatan	Dr. H. Sinaga	PARKINDO
Menteri Agama	KH. Iljas	NU
Menteri Negara Ur. Umum	KH. Rusli Abdul Wahid	Perti
Menteri Negara Ur. Veteran	Dahlan Ibrahim	IPKI
Menteri Negara Urusan Perentjanaan	Ir. Djuanda	

Program kerja dan susunan kabinet Ali Sastroamijoyo II itu mendapat dukungan yang cukup besar dari DPR dan rakyat Indonesia. Namun karena belum berhasilnya Konsituante membentuk UUD Republik Indonesia yang baru, maka cara kerja dan mekanisme hubungan pemerintah dan DPR masih berlandaskan Undang-Undang Dasar Serikat.

Demikianlah pembahasan tentang proses pembentukan kabinet Ali II. Pada bab selanjutnya akan dibahas tentang pelaksanaan program kerja kabinet Ali II.

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
KABINET ALI SASTROAMIJOJO II

Kabinet Ali Sastroamijoyo II ini sepenuhnya bersandar atas kedaulatan rakyat, karena berlandaskan suara terbanyak di dalam DPK yang untuk pertama kali di dalam sejarah negara dan bangsa Indonesia dipilih oleh rakyat secara langsung, rahasia dan demokratis. Selain itu Ali Sastroamijoyo juga menempatkan orang-orang yang dapat diandalkan.

A. Pembatalan KMB

Pembatalan KMB sudah dilakukan secara sepihak oleh kabinet Burhannudin Harahap yaitu pembatalan Uni Indonesia-Belanda. Kemudian kabinet Ali Sastroamijoyo II membatalkan seluruh perjanjian KMB sejak 3 Mei 1956.¹

Sebab-sebab perjanjian KMB dibatalkan adalah :

1. Tidak ada maksud baik dari pihak Belanda.
2. Tidak cocok dengan jiwa rakyat Indonesia.
3. Menghalangi kemajuan bangsa dan negara.

Sebagai alasan untuk membatalkan KMB antara lain diterangkan dalam Rancangan Undang-Undang, bahwa hasil KMB Republik Indonesia Serikat diakui dalam suatu perjanjian yang mengatur kerjasama antara Republik Indonesia dan

¹ G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 Jilid 2*, Yogyakarta, Kanisius, 1988, hlm. 96.

Kerajaan Belanda yang diwujudkan atas dasar sukarela persamaan dan kemerdekaan sepenuh-penuhnya. Setelah perjanjian berjalan lima tahun lamanya, maka nyata bahwa bentuk, ujud dan akibat perjanjian itu terasa kaku dan merupakan ikatan yang sangat menghalang-halangi, merintangi, dan menghambat ke arah pembangunan Republik Indonesia.

Gagalnya perundingan dengan Belanda yang terakhir dalam tahun 1955-1956 di Jenewa menyebabkan keyakinan pada diri bangsa Indonesia, bahwa pihak Belanda tidak akan ada keinginan untuk memenuhi kehendak dan harapan rakyat Indonesia.² Sebab-sebab yang nyata dan terbukti ini mendesak pemerintah Indonesia untuk membatalkan perjanjian KMB.

Penjelasan tentang Rancangan Undang-Undang pembatalan perjanjian KMB oleh kabinet Ali Sastroamijoyo II ini disampaikan tanggal 6 April 1956. Pembatalan ini sudah disampaikan juga pada parlemen. Rancangan Undang-Undang Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland berdasarkan perjanjian KMB lengkap dengan memuat penjelasannya, yang oleh kabinet telah disetujui dalam sidang pada tanggal 3 April 1956. Bunyi lengkap Rancangan Undang-Undang Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland berdasarkan perjanjian KMB adalah sebagai berikut³:

Menimbang : Bahwa demi kepentingan negara dan rakyat Indonesia yang sangat dirugikan oleh perdjandjian Konperensi Medja Bundar di S' Gravenhage dalam tahun 1949 dan yang didaftarkan

² Harian Mimbar Umum, *Sebab-Sebab Perdjandjian KMB Dibatalkan*, Sabtu 7 April 1956, hlm. 1.

³ Harian Mimbar Umum, *Pendjelasan Pemerintah Tentang RUU Pembatalan Persetudjuan KMB*, Senin 9 April 1956, hlm. 1.

pada sekretariat PBB pada tanggal 14 Agustus 1950 no. 894, dianggap perlu membatalkan hubungan antara Indonesia dan Keradjaan Nederland atas dasar perdjandjian ini, termasuk status Uni, serta pertukaran-pertukaran surat dan prasasti-prasasti lain.

Menimbang : Bahwa telah berulang-ulang dinjatakan kepada pemerintah Keradjaan Nederland, bahwa isi dan makna perdjandjian tersebut tidak dapat dipertanggung djawabkan lagi, karena Irian Barat sebagai bagian mutlak dari wilajah Republik Indonesia masih djuga diduduki oleh pemerintah Keradjaan Nederland, walaupun semestinja telah diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia jang penuh berhak atas bagian mutlak itu, pula karena itu Uni Indonesia-Nederland bagi Indonesia ternjata merupakan ikatan yang merugikan dan mempesulit usaha-usaha ke arah pembangunan negara.

Menimbang : Bahwa dari pihak Indonesia senantiasa diusahakan guna mendapat persetujuan dari Keradjaan Nederland untuk mewudjudkan hubungan baru jang lazim antara negara-negara jang berdaulat penuh, dalam beberapa perundingan jang selalu kandas karena ketidaksediaan Pemerintah Keradjaan Nederland.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sejogia dan adil diminta dari pihak Pemerintah Indonesia kesediaan terus-

menerus untuk mengadakan perundingan guna mentjapai perdjandjian bilateral untuk pembatalan jang dimaksudkan di atas dan karena itu tidak ada djalan lain daripada pembatalan unilateral sesuai dengan arti dan makna hukum internasional.

Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat no. 33 tahun 1950, U.U. no. 7 tahun 1950 dan Pasal-pasal 89 dan 120 U.U. Dasar Sementara.

Pembatalan tentang seluruh perjanjian KMB ini mempunyai dua fase yaitu : fase pertama adalah menyelesaikan selkas-lekasnya Undang-Undang, dengan mencantumkan di dalamnya beberapa pokok pendirian mengenai pelaksanaan selanjutnya. Fase ini tidak dapat dipertanggunghkan lagi mengingat kepentingan posisi perjuangan Republik Indonesia. Fase kedua adalah penampungan daripada segala akibat pembatalan KMB. Dalam hal ini pemerintah sudah membentuk suatu panitia penampungan.

Akhirnya dengan persetujuan DPR, pemerintah memutuskan : menetapkan Undang-Undang tentang pembatalan hubungan Indonesia-Nederland berdasarkan perjanjian KMB. Isi dari Undang-Undang tersebut adalah⁴:

Pasal 1 : Pemerintah Republik Indonesia menjatakan, bahwa hubungan Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland atas dasar perdjandjian Konperensi Medja Bundar di S'-Gravenhage dalam tahun 1949 dan jang didaftarkan

⁴ *Ibid*, hlm. 4.

pada Sekretariat PBB pada tanggal 14 Agustus 1950 no. 894, dengan ini dihapuskan dan karena itu adalah batal.

Pasal 2 : Uni Indonesia-Nederland sebagai dimaksudkan dalam statut Uni dengan ini dihapuskan dan karena itu adalah batal.

Pasal 3 : Statut Uni, termasuk lampiran-lampirannya serta persetujuan-persetudjuan serta pertukaran surat jang bersangkutan tentang hal kerdja sama, baik dilapangan urusan luar negeri, Pertahanan dan Kebudadjaan, maupun dilapangan Perekonomian dan Keuangan dihapuskan dan karena itu adalah batal.

Pasal 4 : Undang-Undang, keputusan-keputusan serta peraturan-peraturan pendjelenggaraan mengenai hal-hal tersebut dalam pasal 2 tidak berlaku lagi.

Pasal 5 : Hubungan antara Republik Indonesia dengan Keradjaan Nederland selandjutnja adalah hubungan jang lazim antara Negara-Negara jang berdaulat penuh, berdasar Hukum Internasional.

Pasal 6 : Kepentingan bangsa Belanda jang ada dalam wilajah Republik Indonesia diperlakukan menurut aturan-aturan tertjantum dalam Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan perundang-undangan jang berlaku atau jang akan berlaku dalam wilajah Republik Indonesia. Perlakuan jang dimaksudkan di atas tidak dapat didasarkan atas hak-hak istimewa dengan alasan apapun juga.

Pasal 7 : Pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8 : Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang Pembatalan K.M.B.

Pasal 9 : Undang-Undang ini berlaku mulai hari diundangkan dan berlaku surut hingga tanggal 15 Pebruari 1956.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Dengan berlakunya Undang-Undang Pembatalan KMB, hak-hak istimewa bangsa Belanda yang ada di Indonesia terhapus. Dengan demikian program penyerahan kedaulatan, Akte Penyerahan Kedaulatan serta pertukaran surat tentang status quo Irian Barat telah dihapuskan. Maka bangsa Indonesia sekarang lebih bebas dan dapat berjuang untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam kekuasaan *de facto* Republik Indonesia.⁵

Pemerintah juga menerangkan bahwa dengan diterimanya Undang-Undang ini dan sesudah disahkan oleh Presiden Soekarno, maka sudah dipenuhi syarat-syarat konstitusional yang disebut dalam pasal 120, Undang-Undang Dasar Sementara, artinya presidenlah yang menyatakan peraturan perjanjian KMB itu.

Program kabinet Ali II membatalkan perjanjian KMB ini sangat tepat karena hubungan Indonesia dengan Kerajaan Nederland sudah lama tidak berjalan lagi dan ini menghambat perekonomian Indonesia. Selain daripada itu dalam kenyataannya keadaan Indonesia sejak tahun 1950 sudah berubah dimana negara federal telah kembali pada negara kesatuan.

⁵ Ali Sastroamijoyo, *Tonggak-Tonggak Di Perjalananku*, Jakarta, PT Kinta, 1979, hlm. 349.

B. Perjuangan Irian Barat

Pemerintah sudah memutuskan untuk membentuk propinsi Irian Barat, keputusan ini telah diambil oleh dewan menteri dalam sidangnya tanggal 25 April 1956. Untuk pelaksanaannya maka dibentuk panitia ad hoc yang ditugaskan untuk merencanakan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Propinsi Irian Barat. Mengenai pembentukan propinsi Irian Barat ini Menteri Penerangan Soedibjo, mengatakan bahwa sidang kabinet telah memutuskan untuk memisahkan keresidenan Irian Barat dari propinsi Maluku dan membentuk propinsi Irian Barat tersendiri.


Setelah pembentukan pemerintahan Irian Barat diresmikan, ditetapkanlah Soa-Siu di Tidore sebagai ibukota propinsi dan Zaenal Abidin Syah sebagai gubernur.⁶ Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh pemerintah dalam perjuangan Irian Barat adalah menyampaikan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat pada parlemen. Pokok dari Rantjangan Undang-Undang itu adalah:⁷

- a. Propinsi Maluku dipetjah menjadi 2, yaitu propinsi Maluku dan propinsi Irian Barat.
- b. Propinsi Irian Barat meliputi :
 - 1) Wilayah Irian Barat jang pada saat pembatalan persetujuan KMB tanggal 20 April 1956 masih berada dalam kekuasaan Nederland tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia.

⁶ G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm. 121.

⁷ Harian Pedoman Rakjat, *Perjuangan Irian Barat*, Rabu 23 Mei 1956, hlm. 1.

- 2) Distrik Tidore, Oba, Maba, Imada, Patari, dan Wasila yang kini masuk lingkungan daerah Maluku Utara.
- c. Pemerintah daerah propinsi Irian Barat berkedudukan di Tidore untuk sementara.
- d. DPR beranggotakan 20 orang, DPRD-nja adalah 5 orang. Selama belum dibentuk DPRD tersebut, pemerintahan daerah dijalankan oleh gubernur kepala daerah bersama-sama dengan satu badan pemerintahan yang terdiri dari 5 orang dan diangkat oleh menteri dalam negeri dari tjalon-tjalon yang diajukan oleh gubernur. Jumlah tjalon yang diajukan oleh gubernur dua kali jumlah anggota, diambil dari tjalon-tjalon yang diajukan oleh partai-partai politik atau organisasi massa.
- e. Tugas utama pemerintah propinsi Irian Barat pertama-tama adalah membantu pemerintah pusat dalam perjuangan untuk mengembalikan daerah Irian Barat yang masih diduduki Belanda ke dalam wilayah de facto Republik Indonesia.
- f. Usaha pemerintahan Irian Barat antara lain :
 - 1) Mendirikan kursus-kursus bagi pemuda-pemuda Irian Barat untuk dilatih guna dijadikan pegawai bagi kelantjaran pemerintahan Irian Barat.
 - 2) Membangun daerah-daerah yang berbatasan dengan daerah yang diduduki Belanda.
 - 3) Mengikuti dengan seksama perkembangan politik dan kesedjahteraan rakyat di Irian Barat.



Tindakan kabinet Ali Sastroamijoyo II untuk memperjuangkan Irian Barat secara penuh, sudah pasti akan membawa Republik Indonesia kearah yang baik. Semuanya itu akan mengembalikan Indonesia pada jiwa Proklamasi 1945. Untuk mewujudkan semua ini dibutuhkan tekad, niat dan perjuangan yang sungguh-sungguh dari pemerintah, dan ini tentu saja harus dapat dukungan dari rakyat Indonesia seutuhnya, agar cita-cita perjuangan Irian Barat bisa tercapai. Agar perjuangan Irian Barat ini dapat berhasil, maka pemerintah perlu memperkuat angkatan perang untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi.

C. Memulihkan Keamanan dan Ketertiban, Pembangunan Ekonomi, Keuangan, Industri, Pertanian, Perhubungan, dan Pendidikan.

1. Memulihkan Keamanan dan Ketertiban

Untuk menghadapi kerusuhan di Sulawesi dan Sumatera, pemerintah akan melakukan pendekatan yang lebih baik lagi agar kerusuhan dapat teratasi. Pendekatan itu dapat berupa diskusi dan kunjungan dengan pemimpinnya.

Pemerintah juga berpendapat bahwa pasukan tentara dalam menjalankan tugasnya untuk memulihkan keamanan di suatu daerah harus menghormati perasaan rakyat yang bertalian dengan adat istiadat dan agamanya. Pemerintah akan berusaha supaya pendirian pemerintah dalam soal ini lebih ditaati dan dilaksanakan oleh pasukan-pasukan dalam operasi-operasinya.

Mengenai biaya keamanan diterangkan bahwa biaya itu belum pernah dibebankan kepada daerah, tetapi selalu dari pihak pemerintah pusat. Pemerintah juga akan menganjurkan agar anggaran belanja keamanan dimasukkan dalam

anggaran belanja negara, bagian 1, dan diberi prioritas pertama. Dalam soal penyelesaian tahanan-tahanan, pemerintah akan mengambil tindakan-tindakan untuk mempercepat pemeriksaan dan peradilan serta memerdekakan mereka yang ternyata tidak bersalah dan mereka yang tidak ada alasan untuk lebih lama ditahan.

Pemerintah dalam hal ini telah bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Mengenai kebutuhan materiil masyarakat, akan diusahakan dengan cara berangsur-angsur agar kebutuhan minimal dapat dicukupi.

Untuk mengatasi gangguan keamanan, pemerintah akan memberikan otonomi yang seluas-luasnya sehingga setiap kepala daerah benar-benar bertanggungjawab sepenuhnya terhadap daerah yang dipimpinnya dan dapat pula mengontrol semua hasil pekerjaan bawahannya dalam hal pemulihan keamanan.

Untuk menstabilkan bidang pertahanan dan keamanan maka pemerintah perlu melancarkan tercapainya stabilisasi keamanan dalam negara dengan mengadakan wajib milisi bagi semua warga negara. Pemerintah juga akan memperbaiki nilai-nilai teknis, pendidikan rohani dan jasmani ABRI, sehingga nilai-nilai perjuangan dapat dijunjung tinggi.

Soal pemulihan keamanan di daerah, pemerintah berpendapat bahwa soal Aceh telah cukup jelas dalam keterangan pemerintah. Pemerintah sudah memutuskan untuk mengadakan rencana pemberantasan gerombolan-gerombolan di daerah berdasarkan atas politik pemulihan keamanan yang sudah diutarakan. Kerusuhan di Medan, Palembang, dan Sulawesi akan segera diatasi oleh pemerintah. Pemerintah menyusun rencana agar kerusuhan itu dapat dihentikan.

Untuk memulihkan keamanan maka akan diadakan operasi-operasi militer agar situasi daerah yang bergejolak dapat segera diatasi.

2. Pembangunan Ekonomi dan Keuangan

Sifat program pembangunan yang dijalankan pemerintah Ali Sastroamijoyo II adalah teratur, luas dan merata. Teratur artinya dijalankan dengan sistematis menurut jangka waktu tertentu. Luas dan merata berarti bahwa semua sektor pembangunan harus dikerjakan dengan merata, pembangunan tidak dipusatkan di satu daerah saja tetapi merata diseluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian tidak akan ada lagi daerah yang merasa dianaktirikan.⁸

Pemerintah bermaksud menyampaikan Rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan dalam masa sidang kedua DPR. Semua pengeluaran untuk tahun 1956 akan mulai disusun menurut rencana pembangunan. Sebagai permulaan dari rencana tersebut maka tahun 1956 akan diadakan pembangunan dalam kota terlebih dahulu selanjutnya di daerah-daerah. Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan harus bersama-sama didasarkan atas kepentingan seluruh negara dan rakyat Indonesia, dan bahwa kepentingan daerah luar Jawa harus lebih diperhatikan daripada waktu yang lalu. Pemerintah juga menjelaskan bahwa dalam batas waktu defisit untuk tahun 1956 dan *balans* pada tahun yang akan datang tidak secara besar-besaran dapat menyelenggarakan pembangunan secara lebih teratur, dengan harapan bahwa investasi dari tahun ke tahun dapat ditambah.

⁸ Harian Lembaga, *Tidak ada Daerah Jang dianaktirikan*, 6 April 1956, hlm.1.

Menteri Perekonomian Mr. Burhanuddin mengatakan ada tiga masalah pokok yang harus ditanggulangi yaitu masalah bahan makanan, masalah pencegahan inflasi dan masalah pakaian.⁹

Dalam bidang ekonomi pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, begitu pula dengan *statement of policy*-nya. Pemerintah disini juga akan mempertimbangkan saran tentang cara bagaimana wakil-wakil pengusaha nasional, organisasi tani dan buruh dan organisasi-organisasi lain dapat membantu dalam persiapan selanjutnya dan akan diikutsertakan pada penyelenggaraan rencana pembangunan itu. Ditegaskan lagi bahwa pembangunan harus di seluruh nusantara dan disesuaikan dengan keadaan setempat agar tercapai efisiensi yang sebesar-besarnya. Pemerintah juga akan memperluas hubungan perekonomian dengan Jerman Barat sesuai dengan politik pemerintah, contohnya Indonesia akan mengirim karet, timah dan minyak tumbuh-tumbuhan karena Jerman Barat memerlukan barang-barang tersebut untuk kepentingan industrinya.¹⁰

Pemerintah juga akan memulai pembangunan secara teratur dan menurut rencana berjangka waktu tertentu (5 tahun) yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan menilik pada dasar kepentingan rakyat. Usaha untuk mewujudkan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat jelata dengan mengutamakan kebutuhan primer. Dalam hal koperasi, pemerintah juga akan memperkuat dan mengembangkannya dengan mengajak rakyat untuk

⁹ Harian Lembaga, *Kabinet Mulai Tugasnja*, 28 Maret 1956, hlm. 1.

¹⁰ Harian Lembaga, *Mengadakan Hubungan Ekonomi Dengan Djerman Barat*, 14 Juli 1956, hlm. 1.

mendukung dan berperan serta dalam koperasi, agar rakyat dapat menikmati koperasi tersebut.

Pemerintah juga akan membangun proyek-proyek besar termasuk prioritas dalam rencana 5 tahun pertama yaitu proyek Asahan dan Jatiluhur. Sedangkan proyek pabrik rabuk akan diadakan di daerah Palembang dengan menggunakan sumber tenaga gas alam.¹¹

Pemerintah juga akan memberikan bantuan pada pengusaha-pengusaha nasional. Disini pemerintah akan memberikan perlindungan kepada mereka yang berkedudukan ekonomi lemah, sehingga dapat dicapai keseimbangan dalam lapangan perekonomian di negara Indonesia. Pemerintah tidak akan mengadakan ras-diskriminasi dalam lapangan perekonomian.

Dalam bidang ekonomi, segala transaksi dalam lapangan ekonomi dan perdagangan dengan negara manapun juga harus didasarkan azas-azas mempertinggi taraf kehidupan rakyat, dengan dasar saling menguntungkan.

Mengenai tambang minyak di Sumatera Utara, di daerah Pangkalan Brandan yang sudah menjadi persoalan yang lama terkatung-katung, pemerintah dalam waktu yang singkat akan mengadakan penyelesaian yang final. Dengan adanya tambang minyak ini, diharapkan dapat memperoleh keuntungan agar dapat membiayai pembangunan yang akan dilangsungkan.

3. Industri

Dalam bidang industri, pemerintah akan memajukan industri nasional, supaya secepat mungkin Republik Indonesia dapat menjamin kebutuhan sendiri

¹¹ Harian Surat Kabar Kebangsaan Non-Partai, *Indonesia Akan Membuat Pembangunan Jang Seimbang*, 26 Juni 1956, hlm.1.

dan melindungi industri nasional terhadap persaingan asing. Contohnya pemerintah mendirikan bank industri perkapalan. Disini para pengusaha diharapkan mengatur organisasinya dengan baik agar tidak menimbulkan inflasi. Sehubungan dengan masalah diatas, maka pemerintah menganjurkan agar para pengusaha industri perkapalan mengadakan kerjasama dengan tenaga-tenaga ahli asing untuk mendukung kelancaran usaha itu. Pemerintah juga akan membangun industri-industri agar dapat membuka lapangan pekerjaan, misalnya pabrik semen Gresik. Pabrik semen Gresik perlu ditingkatkan kualitasnya karena pabrik semen Gresik dapat menghasilkan devisa negara yang besar.

4. Perikanan dan pertanian

Pemerintah akan berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan protein rakyat, contohnya dengan meningkatkan usaha perikanan selain itu juga dapat meningkatkan pendapatan nasional. Usaha-usaha perikanan ini diharapkan dapat mempertinggi taraf kehidupan masyarakat nelayan.

Pertanian mendapat perhatian yang lebih, karena Republik Indonesia bersifat agraris yang dapat menunjang proses pertanian. Bahan-bahan industri dan ekspor berasal dari usaha-usaha pertanian, oleh karena itu perlu tetap dipertahankan agar hasilnya lebih baik lagi. Pemerintah juga mempertinggi tingkat hidup petani dengan jalan memperbaiki produksi hasil bumi terutama bahan-bahan makanan rakyat dengan memperluas tanah penanamannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, terutama di daerah-daerah luar Jawa. Disini pemerintah juga akan mempergiat tumbuhnya koperasi-koperasi tani dan memajukan daerah-daerah transmigrasi.

Di kepulauan Riau pemerintah mengadakan perikanan laut. Kepulauan ini dikemudian hari akan menjadi salah satu pusat yang penting dari perikanan laut di Indonesia.¹² Sedangkan di daerah Aceh diadakan percobaan untuk menjalankan pertanian secara mekanis seluruhnya, dan mulai mengerjakan tanah sehingga dapat menikmati hasil-hasilnya.

5. Komunikasi

Pemerintah bermaksud supaya alat-alat pengangkutan di darat, laut juga penerbangan (udara) akan diutamakan untuk memperluas hubungan-hubungan dalam negeri, sedangkan pemasukan kendaraan-kendaraan bermotor akan diatur sehingga lebih praktis dan dapat digunakan di daerah-daerah. Oleh karena itu pemerintah akan lebih banyak menyebarkan kendaraan-kendaraan bermotor itu ke daerah-daerah.

Pemerintah juga akan membangun jalan-poros di Sumatera. Tujuan pembangunan jalan adalah untuk memperlancar hubungan dari daerah ke daerah. Jalan-jalan yang dibangun adalah antara Medan-Riau, Palembang-Medan, Jambi-Riau, Aceh-Padang dan sebagainya. Pembangunan tidak hanya pada jalan-jalan saja tetapi juga pada angkutan-angkutan yang akan mempermudah hubungan dari kota satu ke kota yang lain. Untuk pembangunan jalan-jalan ini, pemerintah membutuhkan dana kurang lebih 8 miliar rupiah. Dana tersebut diperoleh dari hasil-hasil bumi, hasil tambang, devisa negara serta bantuan luar negeri.

Pemerintah akan mengadakan perbaikan jalan-jalan di Propinsi Jawa Tengah. Dalam tahun 1956 akan direncanakan biaya pembangunan untuk

¹² Harian Mimbar Umum, *Pengawasan Sekeras-kerasnya Terhadap Pengeluaran Uang untuk Tjegah Pemborosan*, 21 April 1956, hlm. 2.

perbaikan jalan di Jawa Tengah sebesar Rp. 11.248.400,-. Rencana tersebut sebagian besar merupakan pembangunan berat yang meliputi jalan yang panjangnya lebih kurang 430 km. Menurut perincian daerah keresidenan Semarang yang meliputi jalan sepanjang 90 km dengan biaya Rp. 2.194.800,-, keresidenan Pekalongan 129 km dengan biaya Rp. 1.402.500,-, keresidenan Surakarta sepanjang 36 km dengan biaya Rp. 762.500,-, keresidenan Pati 96 km dengan biaya Rp. 2.909.600,-, dan keresidenan Kedu meliputi jalan sepanjang 49 km dengan biaya Rp. 9.059.000,-.¹³

6. Perburuhan

Menteri Perburuhan Sabital Rasjad akan mengusahakan mengenai tunjangan perusahaan, pakaian dinas, pakaian kerja dan bahan pakaian untuk buruh. Pokok yang diusulkan antara lain :

- a. Tunjangan perusahaan .
- b. Semua kekurangan yang belum dibayar akibat penurunan prosentase akan dibayar.
- c. Pakaian dinas dan pakaian kerja akan diberikan 2 stel dengan cuma-cuma dalam setahun.
- d. Bahan pakaian akan diberikan secukupnya termasuk hubungan dengan importir dan akan mengusulkan pinjaman pada pemerintah.

Dalam bidang perburuhan, pemerintah akan mewujudkan :

- a. Usaha-usaha kearah kebaikan nasib dan kedudukan hukum kaum buruh dan pegawai negeri serta hubungannya dengan perusahaan atau jawatan sehingga

¹³ Harian Lembaga, *Pembangunan Djalan di Djawa Tengah*, 24 April 1956, hlm.1.

berkesempatan mengembangkan bakat dan sifat-sifat yang baik untuk kepentingan masyarakat.

- b. Memberikan segala bantuan dan stimulasi bagi konsolidasi dan pertumbuhan organisasi-organisasi kaum buruh dan pegawai yang sehat.
- c. Mengatur penyelesaian persetujuan, perburuhan dengan melalui prosedur yang lebih demokratis menuju kearah perbaikan perburuhan yang lengkap.
- d. Melengkapkan perundang-undangan perburuhan dan pegawai.

7. Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan

Dalam hal ini pemerintah akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan rakyat di sekolah dan di luar sekolah, baik jasmani maupun rohani atas dasar kepentingan nasional dengan cara menyiapkan berlakunya wajib belajar dalam tempo tertentu dan memperluas pendidikan teknik dan ekonomi yang praktis dan umumnya pendidikan kejuruan sesuai dengan kepentingan pembangunan.
- b. Menyelesaikan perundang-undangan pendidikan nasional hingga tercapai dasar yang sama dan kordinasi yang baik di seluruh lapangan pendidikan dari sekolah rendah sampai sekolah tinggi.
- c. Menyelenggarakan usaha-usaha pokok dan merata untuk memberikan dasar yang kuat dalam pertumbuhan kebudayaan nasional.

8. Politik Luar Negeri

a. Masalah Jepang

Persoalan dengan Jepang menurut hemat pemerintah mempunyai 5 pokok yaitu :

- 1). Soal pampasan yang sudah beberapa tahun merupakan bahan perundingan antara Indonesia dan Jepang dan diharapkan dapat diselesaikan secepat mungkin.
- 2). Soal normalisasi hubungan dengan Jepang. Hubungan normal dengan Jepang menurut pendirian pemerintah baru dapat diadakan, sesudah selesainya pampasan itu. Hubungan normal ini akan disandarkan atas perjanjian bilateral, dan atas politik bebas dan aktif, serta atas jiwa Konferensi Asia-Afrika di Bandung.
- 3). Soal Afrika Utara dan persengketaan di Timur Tengah antara negara Arab dan Israel pemerintah akan senantiasa mengikuti dengan seksama.
- 4). Dalam soal Aljazair pemerintah akan tetap menyokong kemerdekaan rakyat Aljazair, sedangkan dalam soal Timur Tengah simpati pemerintah dan rakyat Indonesia ditujukan kepada nasib ratusan ribu pengungsi Arab, yang dalam keadaan menyedihkan. Selanjutnya pemerintah akan berusaha supaya meletusnya peperangan dapat dihindarkan.
- 5). Soal daerah perbatasan dengan bermacam-macam kerusuhannya akan diselidiki dan akan dicarikan penyelesaiannya oleh pemerintah.

Sebagai simpati atas persoalan Timur Tengah tersebut maka pada tanggal 1 November 1956, Ali Sastroamijoyo mengadakan sidang kabinet. Dalam sidang tersebut, kabinet mengambil keputusan dan mengeluarkan pernyataan, yang isinya sebagai berikut¹⁴:

¹⁴ Ali Sastroamijoyo, *op.cit.*, hlm. 535.

1. Penyerbuan tentara-tentara Israel, Inggris dan Perancis serta pemboman beberapa kota di Mesir merupakan agresi yang sangat tercela.
2. Pemerintah berpendapat bahwa tidak ada suatu anggota PBB, apalagi yang menjadi anggota tetap dari Dewan Keamanan, boleh menjadi hakim sendiri.
3. Pemerintah menyerukan supaya Israel, Inggris dan Perancis segera menghentikan serangannya dan menarik mundur pasukan-pasukan mereka dari wilayah Republik Mesir.
4. Pemerintah menyerukan kepada negara-negara Asia-Afrika, yang dalam konferensi Bandung dengan hikmat berjanji untuk menjunjung tinggi Dasa Sila Bandung, supaya mengadakan usaha bersama guna menghentikan agresi terhadap Mesir itu.
5. Dalam hubungan ini pemerintah telah mengajak negara Colombo untuk mengadakan konferensi antar perdana menteri dalam waktu sedekat-dekatnya, sebagai usaha pertama dari negara-negara Asia-Afrika.
6. Disamping itu pemerintah akan selekas-lekasnya mengadakan persiapan-persiapan dalam bidang keamanan dan ekonomi untuk menyelamatkan baik keperluan penghidupan rakyat sehari-hari maupun keperluan barang-barang pembangunan.

Keputusan-keputusan yang dibuat oleh kabinet ini disambut baik oleh semua kalangan masyarakat.

D. Melaksanakan keputusan Konferensi Asia-Afrika

Latar belakang Konferensi Asia-Afrika adalah adanya keinginan untuk melaksanakan politik luar negeri yang aktif ke arah usaha meredakan ketegangan antara blok Barat dan blok Timur. Disini peran serta Indonesia dituntut guna keberhasilannya dan ini didukung oleh negara-negara yang mempunyai status dan kedudukan yang sama dengan Indonesia. Tujuan kerja sama ini adalah untuk memperkuat negara Asia-Afrika dan tercapainya perdamaian dunia.

Konferensi Asia-Afrika dibuka tanggal 18 April 1955 yang diawali dengan pidato Presiden Soekarno dan diteruskan oleh Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo sebagai ketua konferensi. Konferensi Asia-Afrika ini berlangsung selama satu minggu. Hal pokok yang paling penting dalam konferensi itu adalah sepuluh pasal yang menjadi dasar untuk memajukan perdamaian dan kerjasama di dunia yang saat ini dikenal dengan nama Dasa Sila Bandung. Sepuluh azas yang termuat dalam piagam PBB adalah sebagai berikut¹⁵:

1. Menghormati hak-hak asasi manusia.
2. Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara.
3. Mengakui persamaan semua suku-suku bangsa dan persamaan semua bangsa- bangsa, besar maupun kecil.
4. Tidak melakukan campur tangan di dalam urusan-urusan dalam negeri dan negara lain.
5. Menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan diri baik sendirian maupun secara kolektif sesuai dengan piagam PBB.
6. (a). Tidak mempergunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar.
(b). Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 505.

7. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun.
8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional secara damai, seperti dengan perundingan, persetujuan ataupun dengan cara yang lain secara damai menurut pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan piagam PBB.
9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama secara timbal balik.
10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

Pelaksanaan politik bebas aktif dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara Asia-Afrika, menurut pemerintah akan tetap didasarkan atas kata-kata dan semangat dari resolusi-resolusi yang telah dihasilkan oleh Konferensi Asia-Afrika di Bandung, terutama atas dasar Dasa Sila dari pernyataan mengenai usaha-usaha memajukan perdamaian dan kerjasama di dunia. Ini berarti, pemerintah harus mengutamakan usaha untuk mencari dasar-dasar, sehingga dapat dipakai untuk memperkembangkan saling pengertian. Dengan demikian pemerintah mengharapkan dapat memperkuat hubungan-hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga.

Pemerintah juga tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa beberapa negara mempunyai pandangan yang berlainan, baik dalam soal menjaga keselamatan negara masing-masing maupun dalam soal memelihara perdamaian dan keselamatan dunia. Bagaimanapun juga pemerintah akan berusaha supaya negara-negara Asia-Afrika tidak terpecah belah oleh golongan-golongan yang bertentangan satu sama lain.

Demikianlah pembahasan tentang pelaksanaan program kerja kabinet Ali II. Bab selanjutnya akan dibahas tentang jatuhnya kabinet Ali II.

BAB IV
JATUHNYA
KABINET ALI SASTROAMIJOJO II

Kondisi selama tahun 1956-1957 mengakibatkan meningkatnya ketidakpuasan umum dan ketidakpuasan terhadap sistem parlementer yang berlaku saat itu. Kondisi yang paling menonjol adalah kemerosoton ekonomi, (misalnya terjadi inflasi), korupsi para pejabat pemerintah, pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi, dan konflik Angkatan Darat misalnya persaingan para pemimpin dalam tubuh Angkatan Darat,

Kejatuhan kabinet Ali Sastroamijoyo II ini diiringi dengan pemberlakuan hukum darurat perang. Situasi ini memberi peluang pada Presiden Soekarno untuk meneruskan cita-citanya yang tertunda yaitu mengganti sistem Parlementer menjadi Sistem Demokrasi Terpimpin. Dengan jatuhnya kabinet Ali Sastroamijoyo II, Presiden Soekarno tidak memperoleh hambatan untuk memegang kekuasaan eksekutif. Dengan demikian presiden telah mengabaikan prosedur Konstituante, memperkuat eksekutif, dan menegakkan kembali legalitas revolusioner.

Tindakan Presiden Soekarno mengenai pernyataan hukum darurat perang, memancing banyak kecaman, termasuk dari Masyumi yang menolaknya karena dianggap tidak konstitusional. Tetapi protes itu tidak berpengaruh, karena Wirjono

Prodjudikoro, selaku ketua mahkamah agung, membenarkannya sebagai tindakan dalam keadaan perang yang bisa menyimpang dari konstitusi.¹

Tahun 1957 merupakan tahun hitam bagi kehidupan DPR, partai-partai sekaligus suasana negara kesatuan Republik Indonesia berada dalam cobaan yang berat. Kegagalan Konstituante merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru berikut pergolakan yang terjadi di daerah-daerah serta kabinet yang sering berganti-ganti, telah melahirkan kritik yang luas atas praktek demokrasi liberal. Dalam suasana politik yang suram itu Presiden Soekarno memunculkan ide baru untuk mengatasi krisis. Ide baru yang dilontarkan tanggal 21 Februari 1957 itu disebut Konsepsi Presiden. Pihak DPR mencoba lewat hak interpretasi untuk meminta Presiden Soekarno menerangkan konsep baru tersebut di muka DPR, tetapi usaha ini tidak berhasil.

Berikut ini akan dibahas satu-persatu masalah-masalah yang menyebabkan jatuhnya kabinet Ali Sastroamijoyo II, yaitu:

1. Kemerostan ekonomi.
2. Pemberontakan di daerah Sumatera dan Sulawesi.
3. Perpecahan Soekarno-Hatta.
4. Konsepsi Presiden.
5. Meruncingnya pertentangan dalam tubuh Angkatan Darat.

¹ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1995, hlm. 307.

A. Kemerosotan Ekonomi.

Pada masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamijoyo II ini dibentuk suatu Biro Perancang Negara. Badan ini menyusun suatu rencana pembangunan yang dikemukakan tahun 1956. Untuk melaksanakannya maka dibentuk Dewan Kementerian Negara, tapi ternyata badan ini tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya. Begitu juga dengan Garis-Garis Rancangan Pembangunan 5 tahun, 1956-1960, yang dibuat oleh kabinet Ali Sastroamijoyo II juga gagal. Sebab kegagalan ini karena kabinet Ali Sastroamijoyo II terlalu memfokuskan pada politik luar negeri dan tidak diimbangi dengan pembangunan dalam negeri.

Kegagalan pembangunan ekonomi ini sangat terasa dalam kalangan masyarakat. Salah satu golongan yang mengalami kesulitan ekonomi ini adalah para prajurit di Sumatera Utara. Tindakan pemerintah dalam masalah ekonomi, seperti penyalahgunaan sumber devisa, pemberian izin istimewa kepada anggota partai penyokongnya, serta birokrasi perizinan yang berbelit-belit yang menghambat para pedagang.²

Kurangnya dana kesejahteraan masyarakat dari pemerintah ini banyak menimbulkan kekesalan dalam tubuh prajurit, karena alokasi keuangan untuk operasi-operasi militer dan kesejahteraan para prajurit tidak terjamin. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka para prajurit berusaha untuk mencari dana sendiri. Tanpa sepengetahuan pemerintah pusat, mereka mengeksport hasil produksi lokal. Peristiwa ini terjadi di Sumatera Utara dan Sulawesi Utara.

² R.Z.Leirissa, *PRRI PERMESTA*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1991, hlm. 12.

Penyimpangan yang dilakukan oleh para prajurit ini lebih dikenal dengan istilah barter.

Pada saat terjadi peristiwa di Sumatera Utara ini, pimpinan wilayahnya adalah Kolonel Simbolon. Di Sumatera Utara, kesejahteraan para prajurit memang sangat buruk bahkan para prajurit ini tinggal di rumah atau asrama-asrama yang sangat sempit, padahal jumlah mereka sangat banyak, sehingga tidak bisa menampung jumlah mereka yang besar. Keadaan para prajurit memang sangat memprihatinkan, oleh karena itulah pimpinan mereka yaitu Kolonel Simbolon mengambil inisiatif untuk mencari dana sendiri untuk mengatasi kemiskinan anak buahnya. Jalan yang ditempuh Kolonel Simbolon inilah yang dianggap merugikan pemerintah.

Sebenarnya masalah kesejahteraan para prajurit ini sudah sering diajukan oleh Kolonel Simbolon kepada pimpinan TNI-AD dan menteri pertahanan di Jakarta. Pemerintah tidak memperdulikan keluhan Kolonel Simbolon, sehingga membuat Kolonel Simbolon mengambil jalan pintas yaitu mencari dana melalui penjualan hasil-hasil perkebunan di wilayah Sumatera Timur.

Kegiatan perdagangan yang dilaksanakan selama pertengahan tahun 1956 ini memang menyimpang dari prosedur. Perdagangan itu tidak melalui instansi perdagangan, bea cukai dan lain-lainnya.³ Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak dan instansi-instansi, serta CPM yang dikerahkan untuk mengamankan perdagangan tersebut. Sedangkan yang menadah hasil-hasil perdagangan itu adalah pedagang-pedagang Cina di Medan yang sekaligus bertindak sebagai

³ *Ibid*, hlm. 14.

cukong. Cukong-cukong inilah yang melaksanakan perdagangan dari Sumatra Timur ke Singapura.

Kegiatan perdagangan yang dipimpin oleh Kolonel Simbolon ini sifatnya rahasia. Pelabuhan-pelabuhan yang digunakan adalah pelabuhan Teluk Nibung yang berada di muara sungai Asahan (Tanjung Balai) yang pada saat itu jarang digunakan untuk pelabuhan ekspor. Dikalangan prajurit-prajurit di Medan, operasi ini dinamakan operasi militer darurat. Sebagian keuntungan dari kegiatan perdagangan ini hasilnya diserahkan kepada T.T.I Bukit Barisan dan pembukuannya diselenggarakan oleh staf T.T.I.

Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari perdagangan inilah yang kemudian dipakai untuk membangun asrama-asrama para prajurit Bukit Barisan. Asrama-asrama yang berhasil dibangun adalah berkapasitas tiga batalyon dan empat kompi di Sumatera Timur, Tapanuli dan Sumatera Tengah. Tetapi akhirnya kegiatan perdagangan ini diketahui oleh kalangan pers ibukota, dan mereka memberitakannya sehingga kegiatan perdagangan itu terhenti. Mereka menamakan kegiatan perdagangan ini adalah penyelundupan Teluk Nibung.

Perdana Menteri Ali Sastroamodjojo memerintahkan kepala staf angkatan darat untuk menghentikan kegiatan operasi militer darurat ini, dan direktur kehakiman angkatan darat diperintahkan untuk memeriksa masalah tersebut. Namun karena seluruh administrasi pembukuan operasi tersebut sangat lengkap dan rapi, direktur kehakiman angkatan darat-pun menyatakan bahwa perkara ini selesai.⁴

⁴ *Ibid*, hlm. 15.

Pada awal tahun 1957 perdagangan antar pulau hampir terhenti. Kekurangan beras yang terjadi di daerah-daerah menyebabkan terjadinya kelaparan. Produksi bahan-bahan pokok terus berkurang dan pemerintah Ali Sastroamijoyo II terpaksa mengalokasikan tabungan devisa yang sudah menipis untuk mengimpor beras. Selain itu, pemberontakan yang terjadi di daerah Sumatera dan Sulawesi serta operasi militer untuk menumpasnya menjadi beban tambahan bagi pemerintahan Ali Sastroamijoyo II. Selama ini, daerah luar Jawa merupakan penghasil pendapatan ekspor terbesar. Akibat terganggunya sistem lalu lintas dan pemberontakan di daerah, sumber pendapatan negara menjadi berkurang.

B. Pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi

Disamping kemerosotan ekonomi, pemberontakan di daerah Sumatera dan Sulawesi termasuk faktor yang menyebabkan jatuhnya kabinet Ali Sastroamijoyo II. Sejak jaman kolonial, sebelum perang, terjadi pembangunan yang timpang antara Jawa dan pulau-pulau di luar Jawa. Jawa menjadi daerah yang paling maju dibidang infrastruktur pemerintahan, pendidikan, sistem perhubungan dan sebagainya. Jawa menjadi tempat pemerintahan pusat dan lembaga perdagangan, keuangan, pendidikan serta agama. Di lain pihak, pulau yang dihuni oleh 45 % dari seluruh penduduk Indonesia ini, untuk kelangsungan hidupnya, sangat tergantung pada barang-barang impor yang dibayar dengan pendapatan negara melalui ekspor minyak, timah, dan kopra dari pulau-pulau lain. Perbedaan antara pulau Jawa dan luar Jawa ini sudah dapat dipastikan menyebabkan ketegangan,

dalam pengertian bahwa rakyat di luar Jawa yang menghasilkan barang ekspor merasa dieksploitasi oleh orang Jawa.⁵

Dengan terbentuknya negara kesatuan pada tahun 1950, juga timbul pertentangan terhadap pemerintah pusat, yang juga disusul dengan gerakan kedaerahan yang menentang pemerintah pusat. Juru bicara propinsi mengecam “Jakarta“ karena, disatu pihak tidak memberi otonomi pada daerah, tetapi di lain pihak juga tidak memberi anggaran yang cukup.⁶ Mereka merasa berada di bawah dominasi suku bangsa Jawa yang memegang sebagian besar posisi kunci dalam pemerintahan pusat dan dalam struktur pemerintahan daerah yang diatur oleh pusat.

Sesudah pengakuan resmi terhadap kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, pemerintah nasional kurang memperhatikan pemerintah daerah. Kebijakan penerapan sistem devisa yang dipaksakan oleh pemerintah pusat mempunyai dampak yang besar terhadap pulau-pulau di luar pulau Jawa dan menimbulkan protes yang meluas menentang eksploitasi oleh orang Jawa. Program Banteng, yang terutama menguntungkan perusahaan-perusahaan dagang Indonesia di Jawa, tampaknya merugikan para eksportir dan penghasil barang ekspor di luar Jawa.⁷

Pada tahun 1956, ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat semakin memuncak, terutama di daerah Sumatera dan Sulawesi. Pimpinan militer di daerah ini mulai mengadakan perdagangan barter. Di Sumatra Utara, misalnya, mulai mengekspor hasil-hasil daerah tanpa lisensi dari pemerintah pusat dan

⁵ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, New York, Ithaca, 1962, hlm. 27.

⁶ *Ibid*, hlm. 487.

⁷ *Ibid*, hlm. 488.

menahan hasil usaha tersebut untuk pembangunan ekonomi di daerah Sumatra Utara. Dalam hal ini kewibawaan pemerintah Ali II ditantang oleh praktek penyelundupan yang berkembang secara besar-besaran. Hasil bumi seperti karet dikuasai oleh penyelundup, padahal karet adalah sumber devisa negara yang besar. Dampak adanya penyelundupan ini adalah berkurangnya devisa negara, karena diambil oleh pihak penyelundup. Pemerintah berusaha untuk menghentikan praktek penyelundupan gelap ini, tetapi tidak berhasil, malah daerah di Sumatra menuntut untuk memperoleh otonomi daerah, tetapi permintaan ini ditolak oleh pemerintah pusat.

Pergolakan daerah di wilayah Sumatera pada akhir 1956, muncul secara berturut-turut, yaitu Dewan Banteng, Dewan Gajah dan Dewan Garuda. Sedangkan di Sulawesi ada Dewan Perjuangan Semesta (PERMESTA) dan di Kalimantan, Letnan Kolonel Hassan Basry, panglima divisi setempat mendirikan Dewan Lambung Mangkurat pada tanggal 13 Maret 1957. Seperti daerah yang lain, Lambung Mangkurat ini juga menghendaki perlakuan yang baik dari pusat.⁸

a. Dewan Banteng

Sejak awal tahun 1950, beberapa daerah di luar Jawa merasa tidak puas dan kecewa terhadap kebijakan politik dan ekonomi dari pemerintah pusat. Akibatnya rakyat yang berada di daerah-daerah sejak pertengahan 1950-an tidak lagi menaruh kepercayaan kepada pemerintah. Dengan keadaan bangsa dan negara yang jauh dari memuaskan tersebut, menjadi pemikiran sekelompok anggota divisi Banteng.

⁸ G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 Jilid 2*, Yogyakarta, Kanisius, 1988, hlm. 101.

Sebagai langkah pertama, maka dianggap perlu untuk segera mengadakan reuni eks divisi Banteng. Pada tanggal 20-24 November 1956 berlangsung reuni eks divisi Banteng yang dihadiri oleh 612 orang. Pertemuan ini menghasilkan suatu keputusan bahwa usaha pembangunan daerah akan dilakukan dengan cara mengganti otonomi daerah menjadi otonomi seluas-luasnya, selain itu juga akan menyusun sejarah perjuangan Sumatera Tengah, pembangunan museum perjuangan, veteran, masalah janda dan yatim piatu serta persoalan makam pahlawan. Semua itu dalam pelaksanaannya langsung akan diatasi dan diselesaikan oleh anggota eks divisi Banteng yang berada di Sumatera Tengah, sehingga di bentuk wadah penyalur, sebuah badan non-pemerintah dengan nama Dewan Banteng, sesuai dengan nama divisinya. Dewan ini dibentuk oleh Letnan Kolonel Akhmad Husein, komandan resimen invanteri 4, pada tanggal 20 Desember 1956.

Pusat kegiatan Dewan Banteng terutama antara Padang dan Bukit Tinggi yang kemudian mempersiapkan diri untuk merealisasi keputusan rapat reuni. Sementara itu sebagai kelanjutan keputusan rapat reuni eks divisi Banteng, Letnan Kolonel Akhmad Husein selaku ketua Dewan Banteng telah mengambil keputusan untuk mengambil alih pemerintah daerah Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyoharjo (Masyumi). Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 Desember 1956 di gubernuran Padang. Alasan yang dikemukakan bahwa gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat itu dipandang kurang berhasil dalam membangun daerah Sumatera Tengah. Mengenai masalah otonomi daerah dapat dipahami oleh pemerintah pusat, tapi tindakan Dewan Banteng mengambil alih pemerintahan di

Sumatera Tengah itu dipandang sebagai tindakan yang menyalahi hukum. Berbagai reaksi muncul atas terjadinya peristiwa tersebut, antara lain adanya tantangan. Tantangan terhadap Dewan Banteng terutama datang dari pihak PKI dan PNI, tetapi kenyataannya masyarakat sebagian besar mendukung. Bahkan masyarakat pernah menyatakan kesiapannya mendukung kegiatan Dewan Banteng pada pertemuan organisasi di gedung Nasional Bukit Tinggi pada tanggal 3-5 Januari 1957. Disamping kalangan militer, elite negeri Sumatera Tengah dan para pegawai pemerintah juga meleburkan diri dalam kegiatan dewan. Keadaan ini mencerminkan bahwa gerakan Dewan Banteng didukung sepenuhnya oleh berbagai lapisan masyarakat Sumatera Tengah.

b. Dewan Gajah

Dewan Gajah dibentuk pada tanggal 22 Desember 1956 oleh Panglima Tentara Teritorium (T.T. I) Kolonel Simbolon di Medan, Sumatera Utara. Beliau mengumumkan pernyataan bahwa mulai tanggal 22 Desember 1956 tidak lagi mengakui kabinet Ali Sastroamijoyo II dan untuk sementara melepaskan hubungan dengan pemerintah pusat. Dengan demikian mulai tanggal 22 Desember 1956 ia mengambil alih pemerintahan di wilayah T.T. I. Mulai dari jam 6.00 waktu Sumatera berlaku S.O.B diseluruh wilayah komando T.T. I. Tindakan Kolonel Simbolon tersebut dilatarbelakangi adanya penyelenggaraan reuni para pejuang perang kemerdekaan yang diprakarsai oleh perwira-perwira Angkatan Darat di daerah-daerah. Tujuan semula dari reuni tersebut adalah untuk membina persatuan dan kekompakan.

Namun akhirnya Angkatan Darat terpanggil untuk memelopori demokrasi kekerasan. Kolonel Simbolon merasa tidak puas terhadap kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan di Jakarta saja. Ia melihat bahwa keadaan sudah kritis. Sebagai tindak lanjutnya, Kolonel Simbolon segera mengadakan aksi yaitu dengan menguasai RRI Medan dan beberapa instansi pemerintah yang penting di kota Medan. Disamping itu pernyataan Kolonel Simbolon dengan tindakannya bertolak belakang, sebab di satu sisi beliau menyerukan tetap taat kepada kepala negara Presiden Soekarno, sedangkan dilain pihak beliau melahirkan tindakan-tindakan tidak terpuji.

Menanggapi tindak tanduk Kolonel Simbolon tersebut, pemerintah segera menyerukan kepada beliau agar secepatnya kembali ke jalan yang seharusnya ditempuh oleh anggota tentara. Namun teguran ini tidak ditanggapi, bahkan Kolonel Simbolon menuntut agar kerukunan Dwitunggal Soekarno-Hatta dipulihkan kembali dan posisi presiden Republik Indonesia hendaklah dibawah kendali Dwitunggal. Suasana semakin runyam, sebab Kolonel Simbolon sama sekali tidak menghiraukan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sementara itu perwira dan pejabat tinggi yang ada di Sumatera Utara seperti Kepala Staf T.T. I Letnan Kolonel Djamin Gintings dan Letnan Kolonel Wahab Makmur menentang tindakan Kolonel Simbolon yang melanggar hukum. Dengan demikian ada dua kekuatan yang secara bersama-sama menentang Kolonel Simbolon tersebut. Sebagai tindakan selanjutnya, kabinet Ali Sastroamijoyo II memecat Kolonel Simbolon sebagai panglima T.T. I. Pada

tanggal 27 Desember 1956, Letnan Kolonel Djamin Gintings atas keputusan pemerintah pusat mengambil alih jabatan Kolonel Simbolon.

c. **Dewan Garuda.**

Seperti halnya di Sumatera Tengah, kasus yang sama juga terjadi di Sumatera Selatan. Di Palembang ini juga timbul ketidakpuasan atas jalannya pembangunan yang tidak merata, yang menyimpang dari program yang dibuat oleh kabinet Ali Sastroamijoyo II. Maka pada tanggal 24 Desember 1956, Panglima Divisi Sriwijaya Letnan Kolonel Barlian menyatakan untuk memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat. Akibatnya pada tanggal 27 Desember 1956, Gubernur Winarno (PNI) mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri pada menteri dalam negeri. Sebagai kelanjutan peristiwa ini maka pada tanggal 15-17 Januari 1957, diadakanlah kongres adat Sumatera Selatan, yang melahirkan Piagam Perjuangan Sumatera Selatan dan Dewan Garuda.

Pembentukan Dewan Garuda di Palembang merupakan upaya tiga tokoh di daerah Sumatera Selatan, yaitu Kolonel (purn) Nuh, Kapten (purn) Thalib, dan Amin Husein.⁹ Kolonel Nuh adalah orang yang sangat berpengaruh pada masa perang kemerdekaan, dan pernah menjabat panglima. Dengan pangkat letnan kolonel, Nuh merupakan salah seorang perwira senior di wilayah Sumatera Selatan dan mempunyai pengaruh yang luas. Kapten Thalib pernah menjabat intel Kolonel Simbolon, tetapi kemudian ia meninggalkan dunia kemeliteran pada

⁹ R.Z. Leirissa, *op.cit.*, hlm. 72.



tahun 1951 dan menjadi wiraswasta. Sedangkan Amir Husein adalah seorang pengusaha yang sukses di daerah Sumatera Selatan dan sangat disegani.

Dewan Garuda terdiri atas Letnan Kolonel Barlian sebagai ketua, dengan anggotanya adalah Mayor Nawawi (wakil kepala staf) T.T. I Sriwijaya, Mayor Alamsyah Ratuprawiranegara (asisten I), Mayor Hariman (asisten II), Mayor Asnawi Mangkualam (asisten III), dan Mayor Jusuf Singadikane (asisten IV).¹⁰ Komandan-komandan batalyon dan resimen dalam wilayah ini, seperti Letnan Kolonel Pangabean dan Letnan Kolonel Worang juga menjadi anggotanya. Demikian pula sejumlah tokoh sipil, antara lain ketiga tokoh tadi.

Dalam perkembangannya Dewan Garuda pun berhasil menyusun strategi pembangunan yang dinamakan Piagam Pembangunan. Dalam piagam ini isinya adalah menginginkan Dwi tunggal pulih, dan ini merupakan tuntutan politik untuk mengatasi kemelut kepemimpinan nasional. Selain itu juga dituntut otonomi daerah agar pembangunan daerah berjalan dengan semestinya.

d. Dewan Manguni

Dewan Manguni yang dibentuk pada tanggal 18 Februari 1957 di Manado, Sulawesi utara, adalah hasil bentukan Letnan Kolonel H.N. Sumual. Beliau ketika itu menjabat panglima Tentara Teritorium VII. Latar belakang terbentuknya Dewan Manguni berawal dari suhu politik di Indonesia yang semakin memanas. Dewan ini hanyalah selubung untuk membuktikan bahwa rakyat di daerah mendukung apa yang diperjuangkan oleh tokoh pemberontak tersebut.¹¹ Terbentuknya kabinet Ali Sastroamijoyo II, pada tanggal 24 Maret 1956, membuat

¹⁰ *Loc.cit.*, hlm. 72.

¹¹ Amelia Yani, *Profil Seorang Prajurit TNI*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1988, hlm. 595.

PKI merasa tidak senang dan berusaha untuk menjatuhkan kabinet tersebut. Ketidaksenangan pihak daerah terhadap pemerintahan kabinet Ali II ini dimanfaatkan oleh PKI untuk menggulingkannya.

Salah satu daerah tersebut adalah daerah Sulawesi Utara yang disebabkan karena adanya ketidakpuasan mengenai alokasi biaya pembangunan yang diterima dari pusat. Disamping itu daerah Sulawesi Utara tidak menaruh kepercayaan lagi kepada pemerintah pusat. Puncak dari ketidakpuasan yang timbul di Sulawesi Utara tersebut diwujudkan dalam bentuk pergolakan yang mengarah kepada perlawanan terhadap pemerintah pusat.

Pada awal Februari 1957, pemerintah daerah Sulawesi yang dipimpin oleh Gubernur Andi Pangerang dan rombongan berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan realisasi rencana pembangunan di Sulawesi. Berbagai pihak dan instansi mereka hubungi untuk mewujudkan tujuan mereka, bahkan Presiden Soekarno dan Bung Hatta juga mereka kunjungi.¹² Usaha yang dilakukan Gubernur Andi Pangerang dan rombongannya gagal.

Dalam menghadapi gerakan di daerah-daerah, pemerintah Ali menggunakan tekanan-tekanan militer dan blokade ekonomi. Hal ini semakin menambah ketegangan politik yang sedang terjadi antara pusat dan daerah.¹³ Kekecewaan dan kebencian dari berbagai daerah terhadap pemerintah pusat semakin meningkat, manakala Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo dan KSAD

¹² R.Z. Leirissa, *op.cit.*, hlm. 75.

¹³ Suswanta, *Keberanian Untuk Takut*, Yogyakarta, Avyrouz, 2000, hlm. 50.

Nasution menggagalkan usaha penangkapan Roeslan Abdulgani dengan tuduhan korupsi.¹⁴

Perkembangan di Sumatera dan Sulawesi menimbulkan kegoncangan dalam kabinet Ali Sastroamijoyo II, bahkan Menteri Urusan Veteran Dahlan Ibrahim mengundurkan diri.¹⁵ Dan hal itu semakin menambah suasana politik semakin kacau, bahkan Masjumi menarik menteri-menterinya dari kabinet karena Masjumi menghendaki pelantikan kabinet darurat dibawah pimpinan Hatta. Tapi PNI dan NU menentang permintaan Masjumi ini dan mengakibatkan suasana dalam kabinet Ali Sastroamijoyo II semakin panas.

C. Perpecahan Soekarno-Hatta

Faktor lain yang menyebabkan jatuhnya kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah perpecahan Soekarno-Hatta. Sejak awal kepemimpinannya, Presiden Soekarno berpegang pada kebijakan gerakan politik massa. Sedangkan Wakil Presiden Hatta lebih menyukai pendekatan politik yang lebih konstitusional. Presiden Soekarno beserta pendukungnya percaya pada usaha membangun bangsa, pada usaha membangkitkan dan mempersatukan rakyat yang masih pasif. Soekarno sering berbicara tentang pembangunan, yang baginya berarti pembangunan sosial dan politik, dan bukan pembangunan ekonomi. Harga diri nasional dan kepribadian dalam kebudayaan lebih penting daripada ekonomi nasional dan kepribadian dalam kebudayaan.

Demokrasi yang diikut oleh Soekarno adalah demokrasi ketimuran atau Indonesia

¹⁴ *Ibid*, hlm. 51.

¹⁵ G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm. 99.

yang didasarkan pada musyawarah rakyat dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan bukan demokrasi gaya Barat.

Sedangkan Hatta dan pendukungnya berpendapat bahwa revolusi dianggap sudah selesai dan pembangunan ekonomi harus diberi prioritas. Berbeda dengan Presiden Soekarno, Hatta mengadakan pendekatan yang lebih pragmatis dan lebih mengutamakan masalah-masalah nyata untuk pembentukan citra Indonesia. Untuk meningkatkan produksi yang maksimal, Hatta berpendapat perlu menggunakan modal asing, dan mengizinkan perusahaan-perusahaan Belanda untuk melanjutkan pekerjaannya di Indonesia. Hatta juga berpendapat bahwa perlu melakukan penekanan pada soal hukum dan pemerintahan yang bertanggung jawab. Dalam demokrasi seorang pemimpin tidak bisa bertindak sewenang-wenang, tetapi harus selalu berkonsultasi dengan anggota masyarakat.

Perbedaan pendekatan antara Soekarno-Hatta sebenarnya telah ada semenjak revolusi, tetapi mereka berhasil menjaga kesatuan dan kesatuan untuk memperkuat kemampuan menentang musuh bersama.¹⁶ Akan tetapi, sesudah pemilihan umum, dan terutama sesudah Presiden Soekarno mengajukan usulnya mengenai Demokrasi Terpimpin, perpecahan diantara mereka semakin memburuk.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa antara Soekarno-Hatta sudah tidak ada kecocokan dalam berbagai hal terutama dalam bidang politik. Hatta beranggapan bahwa dirinya dikucilkan dari proses pengambilan keputusan politik. Meskipun keduanya tidak puas dengan praktek partai politik, Hatta masih percaya

¹⁶ Adnan Buyung Nasution, *op.cit.*, hlm. 278.

pada sistem politik partai dan pemerintahan parlementer yang berlaku. Sebaliknya Presiden Soekarno ingin meninggalkan demokrasi parlementer yang dianggapnya condong ke Barat dan tidak sesuai dengan semangat, jiwa, dan kepribadian rakyat Indonesia, yang berdasarkan musyawarah dan mufakat. Disamping itu, Soekarno menjalankan kampanye berapi-api untuk melanjutkan revolusi Indonesia, sedangkan Hatta secara terbuka berkeberatan dan menyatakan bahwa revolusi harus dianggap selesai.

Perlu ditekankan bahwa Hatta berpegang pada pemikiran negara demokratis yang konstitusional serta politik kelembagaan, sedangkan Soekarno berpegang pada politik massa yang revolusioner dan pemerintahan yang tidak dihambat oleh prosedur hukum. Inilah yang merupakan dua pemikiran politik Indonesia yang bersaing sejak awal, dan dalam kepemimpinan dwitunggal, kedua pemikiran ini kurang lebih saling mengimbangi. Perbedaan-perbedaan di ataslah yang kemudian menyebabkan Hatta meninggalkan jabatan wakil presiden Republik Indonesia. Dengan demikian dwitunggal menjadi bubar dan ini membuka jalan bagi Angkatan Darat untuk mengambil alih peranannya untuk membentuk lembaga-lembaga politik yang bukan menurut garis negara konstitusional melainkan menurut garis negara otoriter.

Tahun 1956 merupakan tahun yang amat menentukan bagi kelanjutan perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia. Pada tahun ini juga pecahlah kombinasi Soekarno-Hatta, dwitunggal yang selama 11 tahun bahu-membahu, manunggal seolah-olah sehidup semati dan seia-sekata dalam politik. Dwitunggal Soekarno-Hatta patah dan tidak mungkin dihidupkan kembali. Hatta

mengundurkan diri sebagai wakil presiden Republik Indonesia, karena merasa tidak cocok dengan permainan politik Soekarno yang mulai agresif dan cenderung ingin memonopoli kekuasaan.

Salah satu sebab perpecahan Soekarno-Hatta yang agak berat adalah sikap inkonsisten dari Soekarno dalam masalah-masalah konstitusional dan kenegaraan. Bung Hatta tidak senang dengan cara-cara Soekarno yang mulai kelihatan ingin memonopoli kekuasaan secara tidak fair.¹⁷

Sebenarnya sudah lama Hatta ingin mengundurkan diri, namun ia masih menunggu saat pelantikan Konsituante hasil pemilu 1955. Pada tanggal 10 November 1956 Hatta menganggap momen yang tepat untuk mengundurkan diri. Setelah membenahi segala sesuatu yang perlu dilakukan, secara resmi, tiga minggu setelah Konsituante dibuka yaitu pada tanggal 1 Desember 1956, Bung Hatta menjadi warga negara biasa sampai akhir hayatnya.

Pengunduran diri Hatta telah menimbulkan keresahan dan serangkaian protes, khususnya dari kalangan luar Jawa dan yang anti komunis. Adanya simpati kepada Hatta telah memperkuat kecenderungan anti Soekarno dan anti Jakarta. Pecahnya Dwitunggal Soekarno-Hatta, juga berpengaruh dalam kepartaian. PSI, Masjumi condong ke Bung Hatta sedangkan PNI, PKI dan partai yang lain condong ke Bung Karno.¹⁸

Bung Hatta menyatakan, meskipun dia tidak menjabat sebagai wakil presiden, tetapi Bung Hatta tidak akan meninggalkan rakyat, untuk itu tidak ada

¹⁷ Ahmaddani, dkk, *Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*, Jakarta, Purbasari, 1984, hlm. 236.

¹⁸ Suswanta, *op. cit.*, hlm. 64.

gunanya menyampaikan perpisahan terhadap rakyat, malahan dia akan menjadi rakyat. Dengan demikian, hubungan dengan rakyat akan semakin erat.¹⁹ Ucapan ini disampaikan Bung Hatta pada Presiden Soekarno tanggal 1 Desember 1956.

Pengunduran Bung Hatta sebagai wakil presiden pertama di Indonesia terjadi disaat yang tidak menguntungkan. Bukan saja pemilu 1955 gagal menciptakan kestabilan, bahkan menambah intensitas ketegangan politik, krisis kepemimpinan di kalangan Angkatan Bersenjata. Semua ini harus dihadapi oleh kabinet Ali II, padahal masalah keamanan belum mendapat pemecahan. Pendeknya kesemrawutan kehidupan politik pada masa itu mengakibatkan macetnya usaha pembangunan nasional dan memancing pergolakan demi pergolakan.

D. Konsepsi Presiden

Di tengah-tengah krisis politik yang sulit, Presiden Soekarno melontarkan suatu konsepsi yang dinamakan Konsepsi Presiden. Dampak dari konsepsi ini sangat merugikan kabinet Ali Sastroamijoyo II karena tanpa pemberitahuan sebelumnya, apalagi dalam saat yang bersamaan kabinet ada konflik dengan Masjumi. Konsepsi Presiden ini memancing reaksi di mana-mana.

Sebelum mengumumkan konsepsi ini, Presiden Soekarno sudah menunjukkan antipatinya terhadap sistem politik yang berlaku. Pada bulan Oktober 1956, ia menyatakan bahwa semua partai politik sebaiknya dikubur karena merupakan sumber penyakit yang menyebabkan perpecahan bangsa. Disini

¹⁹ Ahmad Muhsin, *Bung Karno dan Tokoh-Tokoh Komunis*, Jakarta, P.T. Golden Terayon Press, 1989, hlm. 37.

Soekarno juga mengusulkan bahwa Indonesia cukup memiliki satu partai massa tunggal, seperti yang ada di Cina dan Rusia. Pada bulan November 1956 dalam Konstituante, Soekarno menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan sistem politik yang baru yang sesuai dengan tradisi bangsa Indonesia, dan pada akhir 1956, ia mengumumkan bahwa ia sudah mempunyai konsep. Soekarno menyatakan bahwa selama Indonesia mempertahankan sistem parlementer yang beraliran Barat, maka yang berlaku bukanlah demokrasi Indonesia melainkan demokrasi yang di impor. Karena itu dia menilai bahwa sistem parlementer ini tidak sesuai dengan jiwa dan kepribadian rakyat Indonesia yang harus diganti dengan yang lebih sesuai dengan budaya Republik Indonesia.

Sistem parlementer dianggap presiden sebagai penyebab kerawanan politik di Indonesia. Karena itu, presiden menegaskan bahwa Indonesia harus meninggalkan demokrasi liberal dan kembali ke kepribadian Indonesia sendiri yang berarti pemerintahan dengan azas gotong-royong yang tidak mentolelir oposisi. Dasar konsepsi Soekarno ini adalah keinginan untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai seorang pemimpin yang populis, Soekarno mempunyai obsesi bahwa ia harus menjadi seorang pemimpin seluruh bangsa dan menjadi juru bicara yang sanggup mengungkapkan ketidakpuasan umum yang terjadi di Indonesia. Dan yang terpilih adalah demokrasi terpimpin yang dianggap sebagai seruan dan sekaligus sebagai saluran bagi keluhan dan aspirasi rakyat Indonesia.

Soekarno secara eksplisit menyebut tiga unsur dari konsepnya itu, yaitu²⁰:

1. Anti Demokrasi Liberal.

Soekarno menuduh demokrasi liberal yang diimpor dari barat, sebagai sumber semua kesulitan yang harus dihadapi negara. Baginya, sistem partai, pemerintahan parlementer, oposisi politik dan perekonomian yang individualistis semuanya merupakan bagian dari sistem liberal yang tidak sesuai dengan jiwa dan tradisi Indonesia. Bayangan Soekarno tentang masyarakat Indonesia adalah persatuan yang harmonis dan utuh. Pertentangan, kontradiksi, dan oposisi akan diganti dengan persesuaian dan mufakat. Soekarno menyerang partai-partai politik dan parlemen karena dianggap tidak sungguh-sungguh mewakili rakyat karena dikuasai oleh kelompok-kelompok elit yang tidak berpijak pada keinginan rakyat.

2. Kembali ke Kepribadian Nasional

Menurut Soekarno, sistem politik yang berlaku saat itu hanya merupakan jiplakan model barat yang mungkin cocok untuk eropa namun tidak cocok untuk Indonesia. Soekarno menginginkan supaya Indonesia menciptakan sistem sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai tradisi Indonesia yakni gotong-royong serta musyawarah untuk mufakat.

3. Meneruskan Revolusi.

Berbeda dengan pendapat Hatta, Soekarno sangat percaya bahwa revolusi harus dilanjutkan, dan ia menganggap revolusi sebagai jiwa proklamasi kemerdekaan.

²⁰ Adnan Buyung Nasution, *op.cit.*, hlm. 305.

Selain itu presiden meminta supaya bangsa Indonesia menganut suatu demokrasi yang mengandung kepemimpinan di dalamnya yang diarahkan pada satu tujuan, yakni masyarakat yang berkeadilan sosial. Satu demokrasi yang berdisiplin, satu demokrasi yang sesuai dengan dasar hidup bangsa yaitu gotong-royong, serta demokrasi yang membatasi diri sendiri pada tujuan yang satu, satu demokrasi yaitu demokrasi terpimpin.

Ketika Presiden Soekarno menyampaikan usul Konsepsi Demokrasi Terpimpinnya kepada partai-partai dalam bulan Februari 1957, beberapa partai besar (termasuk NU) menolaknya.²¹ Pemimpin Masjumi, Kyai Ahmad Dahlan, mengemukakan bahwa impian Soekarno bertentangan dengan ajaran agama Islam, dan suara lain menuduh Soekarno hendak menjadi diktator.²² Tetapi karena kegigihan Bung Karno, maka ditengah-tengah krisis politik yang sulit pada tanggal 21 Februari 1957, di depan tokoh-tokoh ibukota, para pemimpin kabinet, pimpinan partai dan organisasi, kepala staf Angkatan Bersenjata, perwira tinggi, Presiden Soekarno mengemukakan konsepsinya.²³ Alasan dikeluarkannya konsepsi adalah untuk mencari jalan keluar yang dihadapi oleh negara.

Setelah Konsepsi Presiden dikumandangkan, esok harinya tanggal 22 Februari 1957, di Jakarta penuh dengan corat-coret, poster, famlet, yang isinya menyatakan dukungan terhadap Konsepsi Presiden. Selain itu juga adanya yel-yel dari pemuda-pemuda yang dikoordinir oleh pemuda rakyat yang meneriakkan agar konsepsi diterima. Mr. Hardi dari PNI menyatakan mendukung. Aidit dengan

²¹ Herbert Feith, *Soekarno dan Militer dalam Demokrasi Terpimpin*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001, hlm. 20.

²² Ahmad Muhsin, *op.cit.*, hlm.41.

²³ Suswanta, *op.cit.*, hlm. 69.

gaya diplomasi menyatakan bahwa PKI tidak menaruh keberatan apapun terhadap isi konsepsi. Dr. Soekiman dengan tegas menolak. Anwar Haryono, juru bicara Masjumi, mengumumkan bahwa partainya menolak konsepsi secara keseluruhan.²⁴ Masyumi tidak setuju dengan diikutsertakannya PKI dalam kabinet, karena hal itu berarti kematian bagi demokrasi.

Pada tanggal 2 Maret 1957 Masyumi, PNI, PSII, Partai Katolik dan PRI Bung Tomo mengeluarkan pernyataan bersama menolak Konsepsi Presiden.²⁵ Kelima partai ini mengatakan bahwa gagasan konsepsi adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, terutama gagasan pembentukan Dewan Nasional. Menurut mereka, presiden tidak mempunyai wewenang merubah struktur negara secara menyeluruh, karena wewenang itu ada pada Konstituante.

Dengan adanya Konsepsi Presiden, keadaan negara Indonesia saat itu menjadi genting, pertentangan antar partai-partai makin menjadi. Kedudukan kabinet parlementer semakin tidak stabil dan membuat wibawa kabinet Ali Sastroamijoyo II pudar.

E. Meruncingnya Pertentangan Dalam Tubuh Angkatan Darat.

Akibat dari peristiwa 17 Oktober 1952, Nasution diberhentikan sebagai KSAD dan beberapa perwira militer yang mendukung peristiwa 17 Oktober 1952 juga diberi sanksi yang sama. Kedudukan Nasution digantikan oleh Kolonel Bambang Soegeng.

²⁴ *Ibid*, hlm. 71.

²⁵ *Ibid*.

Pada bulan Agustus 1956, KSAD Nasution mengadakan program pergeseran di antara komando teritorium. Tanggal 14 Agustus 1956 diberlakukan pergantian komando teritorium Jawa Barat dari Kolonel Kawilarang kepada Letnan Kolonel Soeprayogi. Pada tanggal 23-26 Agustus 1956 akan dilaksanakan penyerahan jabatan komandan teritorium Indonesia Timur dari Kolonel Warouw kepada Letnan Kolonel H.N. Sumual dan pada tanggal 17 September 1956, Kolonel Simbolon diganti Kolonel Zulkifli Lubis sebagai komandan teritorium Sumatera Utara. Sedangkan jabatan deputy KSAD akan diserahkan kepada Kolonel Gatot Subroto.²⁶ Ternyata program ini ditentang oleh perwira yang bersangkutan, terutama mereka yang merasa dirugikan posisinya akibat dipindahkan.

Di kalangan militer memang sudah terjadi konflik. Persaingan perseorangan, pertentangan ideologi, sentimen kesukuan, serta ketegangan antar militer daerah dan pusat adalah konflik intern yang mewarnai kaum militer.²⁷

Dilihat dari kesejahteraan, militer Indonesia lahir dari tiga elemen pokok yang masing-masing mempunyai karakteristik yang sangat berbeda. Tiga elemen pokok tersebut adalah KNIL, PETA, dan Laskar.²⁸ KNIL (*Koninklijke Nederlands Indische leger*) adalah tentara kolonial Belanda sebelum Jepang. Sedangkan PETA adalah pasukan sukarela pada masa Jepang. Adapun Laskar adalah pasukan pemuda bersenjata yang dibentuk oleh pasukan Jepang di luar PETA. Yang

²⁶ *Ibid*, hlm. 50.

²⁷ *Ibid*, hlm. 41.

²⁸ *Ibid*.

termasuk Laskar adalah Barisan Benteng, Barisan Berani Mati, Barisan Pelajar, Pemuda Sosialis Indonesia, Barisan Pelopor dan Laskar Rakyat.

Adanya persaingan diantara para militer itu menyebabkan suasana negara semakin rawan. Militer beranggapan bahwa pemerintah sipil tidak cekatan dalam mengatasi konflik-konflik yang ada. Sedangkan pemerintah sipil beranggapan bahwa militerlah yang menambah keruh suasana, karena mencampuri urusan pemerintah sipil.

Jatuhnya kabinet Ali Sastroamijoyo II dan pengumuman berlakunya hukum darurat perang diseluruh negara mengubah tatanan politik di Indonesia dengan sangat drastis. Kabinet Ali Sastroamijoyo II meskipun lemah sesungguhnya merupakan pemerintahan parlementer pertama bagi Indonesia yang dibentuk dan didukung oleh parlemen hasil pemilihan umum. Kejatuhannya begitu tragis karena diguncangkan oleh pertentangan dalam tubuh Angkatan Darat ditambah dengan oposisi dari daerah. Konsepsi Presiden mempunyai makna yang lebih dalam, yaitu runtuhnya seluruh sistem pemerintahan parlementer dan politik partai di Indonesia.

BAB V

SIMPULAN*

Dari uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya tentang masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamijoyo II, dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Proses pembentukan kabinet Ali Sastroamijoyo II dapat dikatakan berjalan lancar karena situasi saat itu cukup tenang. Pembentukan kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah koalisi antara PNI, Masyumi dan NU. Dalam menyatukan ide-ide antara partai PNI, Masyumi dan NU sering terjadi perbedaan pendapat, tetapi semua itu dapat diatasi berkat kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh Ali Sastroamijoyo. Pada tanggal 26 Maret 1956, kabinet Ali Sastroamijoyo II resmi menjalankan kabinetnya atas dukungan DPR dan persetujuan Presiden Soekarno.
2. Pelaksanaan Kabinet Ali Sastroamijoyo II ada yang berjalan lancar dan ada yang tidak. Yang tidak lancar misalnya dalam bidang keamanan, yaitu kabinet dihadapkan pada kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di daerah Sumatera dan Sulawesi. Sedangkan sukses besar yang diraih oleh pemerintahan kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah dibangunnya pabrik semen Gresik, pembentukan otonomi propinsi Aceh, Irian Barat, Kalimantan barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur serta dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Otonom dan Undang-

* Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya, 1995, hlm.104-105, G. Moedjanto, *Dari Kesimpulan ke Simpulan*, Kedaulatan Rakyat, 28 Oktober 2000, hlm 8.

Undang Rencaana Pembangunan Lima Tahun (1956-1960). Dalam bidang ekonomi, meski kekecewaan terhadap pemerintahan kabinet Ali Sastroamijoyo II meluas, tetapi harga-harga tidak mengalami goncangan.

3. Surutnya wibawa pemerintahan Ali Sastroamijoyo II mulai dirasakan pada pertengahan tahun 1956, di mana muncul masalah-masalah seperti pemberontakan di daerah Sumatera dan Sulawesi, korupsi pejabat pemerintah, dan adanya konflik dalam tubuh Angkatan Darat. Hal yang membuat pemerintahan kabinet Ali Sastroamijoyo II semakin terpuruk adalah dengan dikeluarkannya Konsepsi Presiden pada tanggal 21 Februari 1957. Pada tanggal 14 Maret 1957, Ali Sastroamijoyo mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno, yang diiringi dengan diberlakukannya kondisi negara dalam keadaan darurat (S.O.B.).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Taufik. (1997). *Sejarah Indonesia (Penilaian Kembali Karya Utama Sejarawan Asing)*. Depok : Penelitian UI.
- Ahmad Muhsin. (1989). *Bung Karno dengan Tokoh-Tokoh Komunis*. Jakarta : Golden Terayon Press PT.
- Ahmadani, dkk. (1984). *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta : Purba Sari.
- Ali Sastroamijoyo. (1974). *Tonggak-Tonggak di Perjalananku*. Jakarta : Kinta PT.
- Amelia Yani. (1988). *Profil Seorang Prajurit TNI*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Berkhofer, Robert, F. (1971). *A Behavioral Approach to Historical Analysis*. New York : The Free Press.
- Departemen Penerangan. (1970). *Susunan dan Program Kabinet Republik Indonesia Selama 25 Tahun 1945-1970*. Djakarta : Pradnja Paramita.
- Feith, Herbert. (1962). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, New York : Cornell University Press.
- , (2000). *Soekarno Dan Militer Dalam Demokrasi Terpimpin*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Gottschalk, Louis. (1998). *Mengerti Sejarah*. Jakarta : UII Press.
- Hadari Nawawi. (1990). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Kansil, C.S.T. (1990). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Lapian, A.B. (1996). *Terminologi Sejarah*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Leirissa, R.Z. (1991). *PRRI PERMESTA*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Lijphart, Arend. (1995). *Sistem Pemerintahan Parleментар dan Presidensiil*. Jakarta : Grafindo Raja.
- Miriam Budiarto. (1991). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.

- Moedjanto, G. (1988). *Indonesia Abad ke-20 Jilid 2*. Yogyakarta : Kanisius.
- Nasution, Adnan Buyung. (1995). *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia*. Jakarta.: Pustaka Utama Grafiti.
- Nasution, A.H. (1983). *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 3*. Jakarta : Gunung Agung.
- Nugroho Notosusanto. (1971). *Iktisar Republik Indonesia 1945–Sekarang*. Djakarta : Departemen Pertahanan dan Keamanan Pusat Sejarah ABRI.
- Pringgodigdo, A.K. (1956). *Kedudukan Presiden Menurut Tiga UUD dalam Teori dan Praktek*. Djakarta : Pembangunan PT.
- Sartono Kartodirdjo. (1992). *Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sumadi Suryabrata. (1983). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Rajawali CV.
- Suswanta. (2000). *Keberanian Untuk Takut*. Yogyakarta : Avyrouz.
- Ulv Sundhaussen. (1986). *Politik Militer Indonesia 1945-1967*. Jakarta : LP3ES.
- Yahya A. Muhaimin. (1982). *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945–1966*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Surat Kabar :
- Harian Lembaga. *Kabinet Mulai Tugasnja*. 28 Maret 1956.
- Harian Lembaga. *Tidak ada Daerah Jang dianaktirikan*. 6 April 1956.
- Harian Mimbar Umum. *Sebah-sebab Perdjudjian KMB Terpaksa Dibatalkan*. Sabtu 7 April 1956.
- Harian Mimbar Umum. *Pendjelasan Pemerintah Tentang RUU Pembatalan Persetujuan KMB*. Sabtu 9 April 1956.
- Harian Pedoman Rakjat. *Perjuangan Irian Barat*. Rabu 23 Mei 1956.
- Harian Surat Kabar Kebangsaan Non-Partai. *Indonesia Akan Membuat Pembangunan Jang Seimbang*. 26 Juni 1956.
- Harian Lembaga. *Mengadakan Hubungan Ekonomi Dengan Djerman Barat*. 14 Juli 1956.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



LAMPIRAN

MULAI TUGASNJA

Sidang pertama mensohkan program kabinet dan mengganti undang2 pembatalan Uni dengan RUU jang baru

Kabinet dalam sidangnja jang pertama kemaren petang telah membitjara rakan dan menjetudjui program kabinet jang d'adjukan oleh formateur pada waktu pembentukan kabinet. Selain dari pada itu lantaran keberatan Presiden untuk menanda tangani undang2 pembatalan Uni Indonesia-Belanda jang disahkan oleh parlemen sementara tanggal 28, Pebruari jl. maka kabinet dlm sidangnja kemarin tli memutuskan utk mengganti undang2 tsb. dgn rantjangan undang2 baru jg berisi pembatalan seluruh perdjandjian KMB. Rantjangan undang2 tsb. segera akan disampaikan kepada parlemen. Demikian menurut RRI tadi malam.

Sebelum itu menurut „Antara“ kemarin telah dilangsungkan upacara timbang terima djabatn menteri2 jang lama pada menteri2 jang baru disemua kementerian. Per-tama perlu dikabarikan bahwa timbang terima dilakukan oleh PM. Burhanuddin Harahap kepada PM Ali Sastroamidjojo dikeduag Dewan Menteri di Pedjambon dihadiri djuaga oleh kedua wakil PM jaitu, Mr. Mohd. Roem dan Idham Chalid. Timbang terima ini dilakukan djuaga oleh Mr. Burhanuddin Harp pada Mr. Ali Sastroamidjojo dalam djabatn mereka masing2 so bagai menteri pertalanaan ad in-trini dikementerian pertalanaan.

Upacara timbang terima dikementerian perekonomian dipimpin oleh sekdjen kementerian perekonomian, Mr. Sumarno jg dihadiri djuaga oleh kepala2 direktorat, kepala djawatan2 dan pedjabat2 tinggi di kementerian perekonomian.

Dikementerian lainnja.

Menteri perekonomian jang lama, I.J. Kasimo menyatakan bahwa tugas kementerian jang dipimpinnja meliputi tiga pokok pertama penjelesan masalah bahan makanan, kedua masalah pakalan dan ketiga soal jang meliputi masalah umum tetapi djuga termasuk dalam tugas kementeriannja, jaitu menjegah faktor jang dapat menimbulkan inflasi. Tugas itu menurut Kasimo telah dapat dilakukannja dgn baik dan hanja tinggal menjempurnakannja sadja.

Tentang keadaan beras dikatakahi Kasimo, bahwa borkat adanja import beras jg banyak dari luar negeri maka situasi beras itu dalam waktu satu atau dua minggu ini, sudah agak turun, dan Kasimo mengharapnkan akan dpt lebih turun lagi.

Usul2 jang dikemukakan oleh pedjabat2 dikementerian perhubungan mengenai usaha kemajuan pekerdjaan kementerian tersebut, asalkan sadja usul2 itu dimajukan melalui prosedur jang lazim artinya tidak merupakan serobotan langsung diadjukan pada menteri2 perhubungan jang berarti merusak tata tertib. Iapun berpendapat bahwa setiap direktorat dibawah ke-

Sementara itu, menteri perekonomian jang baru dalam pidatonna menyatakan terima kasihnja. Seterusnja Mr. Burhanuddin, menteri perekonomian baru ini, menganggap bahwa soal bahan makanan dan pakalan tetap merupakan faktor jang terutama dan hal ini akan memperoleh perhatian menteri jg utama.

Tugas perhubungan

Sementara itu, upacara timbang terima dikementerian perhubungan dilakukan pada djam 10.00 pagi, dipimpin oleh sekdjen kementerian tersebut, Ir. Abdul Muthalib. Setelah menteri2 lama F Laoh dan Asraruddin menjampai pidatonna jang antara lain mengisahkan pengalamannja dan tugas jang dilakukannja dikementerian tersebut, maka berbitjara menteri baru Suchjar Tedjasukmana jang antara lain mengatakan bahwa ia menempujai fikiran jang terbuka, terhadap sog-

menteriannja dapat bertindak langsung setjara otonomi agar pekerdjaan di kementerian itu dapat dilakukan tjepat tapi sempurna. Di insjainja betapa vitalnja soal2 perhubungan ini dalam lelutintas ekonomi sosial/kebudajaan. Tanpa udanja kemajuan dalam lapangan ini, maka Indonesia tidak mungkin mempunyai kedudukan jang sama tingginnja dengan negara2 jang telah maju dalam lapangan ini.

Isa menyatakan tentang pengalaman pahit disebabkan djeleknja perhubungan didaerah2 Indonesia Timur, dan disuatu pulau, banyak barang2 bertumpuk2 tidak dapat diangkut jang sesungguhnya sangat diperlukan oleh pulau jang hanja berjarak 150 KM dari pulau itu.

Pemerintah Indonesia menang dan berlaku.

Karena sebagai dinjatakan tudjdjangka waktu berlaku Uni dan tjara pembubaran tidak ditentukan, karena hubungan Uni itu terbentuk atas dasar kesukarelaan dan karena pula tidak sejogja dan adil dimlnta dari pihak Pemerintah Indonesia kesediaan terus-menerus untuk mengadakan perundingan guna menjapai perdjandjian bilateral untuk pembatalan jg dimaksudkan dilatas, maka Pemerintah Indonesia menang dan berhak membatalkan Statut-Uni serta perdjandjian jang dilampirkan dengan pertukaran surat jg bersangkutan, setjara unilateral dengan penuh kejakinan, bahwa Pemerintah Indonesia setjara demikian tidak menjalahi hukum Internasional.

Tidak ada daerah jang dianak-tirikan

PROGRAM PEMBANGUNAN : TERATUR LUAS DAN MERATA

Sifat rentjana program pembangunan tidak dipusatkan di satu daerah saja, tapi merata disegala pelosok daerah seluruh Indonesia. Dengan demikian tidak ada lagi daerah jang merasa dianak-tirikan.

Bukan sementara lagi. Demikian keterangan Menteri Muda Pertanian Sjech Marhaban dalam resepsi pembukaan konperensi-dinas Djawatan Perikanan Darat jang diadakan Rabu siang di Sekolah Perikanan Darat Sukabumi.

Selanjutnja diterangkan oleh Menteri Marhaban, bahwa kabinet sekarang ini dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum jang baru lalu, dan karenanja ia didukung oleh aliran jang terbesar dalam masyarakat, dan berdasarkan semua ini, maka segala program pembangunan pemerintah tidak lagi bersifat sementara, tetapi semua itu mempunyai dasar jang prinsipil.

Mengenai anggaran belandja negeri, diterangkan oleh menteri, bahwa pemakalan keuangan akan dihemat. Tetapi ini bukan berarti bahwa objek2 pembangunan dikurangi, hanya pengeluaran keuangan sekarang dipehtungkan sedemikian rupa hingga pemakalan uang itu membawa hasil pembangunan jang efficient.

Mengenai rentjana pembangunan dikementerian pertanian, menteri menerangkan bahwa kementeriannya mempunyai djuga program jang telah ditentukan dan ini dititik beratkan terutama kepada; Meningkatkan kwaliteit pertanian dengan memperbesar produksi serjara intensif dan extensif; meningkatkan bank2 tani dan koperasi dengan maksud untuk menimbulkan oto-aktiviteit rakyat;

pembangunan dalam seluruh sektor-objek pertanian dan memperbaiki ganda hasil peternakan, termasuk perikanan darat. Dengan sifat program jang teratur, luas dan merata ini semoga kekurangan2 jang masih ada pada kita dapat lekas dikedjar dan kekurangan protein jang dibutuhkan sekali oleh rakyat dapat pula dipenuhi. Demikian Menteri Marhaban.

(Ant).

Sebab2 Perdjandjian KMB terpaksa dibatalkan

- TIDAK ADA MAKSUD BAIK BELANDA.
- TIDAK TJOTJOK DENGAN DJIWA RAKJAT.
- MENGHALANGI KEMADJUAN BANGSA DAN NEGARA.

Djakarta, 6-4 (PIA).

Dalam rentjana undang2 pembatalan KMB yang telah disarkan oleh pemerintah baru2 ini ditjantumkan ketentuan yang mengatur hubungan baru antara Indonesia dan Belanda, atas dasar hukum internasional antara 2 negara yang berdaulat penuh.

Menurut keterangan2 yang diperoleh „PIA“, berdasarkan atas timbal balik pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada Belanda ditempatkannya perwakilan diplomatik bertingkat ke dutaan besar untuk memelihara kepentingan Belanda dinegeri ini.

Hilang kedudukan istimewa. Tentang kepentingan bangsa Belanda di Indonesia lainnya diterangkan, bahwa dalam rentjana undang2 itu bahwa karena kepada bangsa Belanda diberikan perlakuan sebagai kepada bangsa asing lainnya, maka kepentingan bangsa Belanda di Indonesia diperlakukan sesuai dan menurut peraturan nasional dan bagaimanapun juga tanpa membatasi dan mengurangi kepentingan negara dan rakjatnja.

Sebab pembatalan KMB.

Sebagai alasan untuk membatalkan KMB antara lain diterangkan dalam rentjana undang tersebut, bahwa hasil KMB dimana RI diakui kedaulatannya dalam suatu perdjandjian yang mengatur tjara kerdjasama antara RI dan keradjaan Bld jg diwujudkan atas dasar sukarela bersama

an dan kemerdekaan sepenuhnya.

Setelah perdjandjian itu berdjalan 5 tahun lamanya, maka ternjatalah bahwa bentuk wujud dan akibat isi perdjandjian itu terasa kaku dan merupakan ikatan yang sangat menghalang-halangi, merintang dan menghambat usaha2 kearah pembangunan R.I.

Makin lama makin terang, bahwa isi dan makna dari perdjandjian itu oleh rakjat Indonesia dianggap gadjil dan tidak tjotjok dengan djiwa dan idam2an rakjat Indonesia.

Perdjandjian perekonomian dan keuangan merugikan Indonesia.

Gagalnja perundingan dengan Belanda yang terakhir yaitu dalam tahun 1955 — 1956 di Djenewa menjebabkan kejakinan pada kita, bahwa pada pihak Belanda tidak akan ada keinginan untuk memenuhi kehendak dan harapan rakjat Indonesia. Sebab2 yang nyata dan terbukti ini mendesak pemerintah Indonesia untuk membatalkan perdjandjian KMB demikian antara lain2 alasan2 pembatalan jg ditjantumkan dalam rentjana undang2 itu.

Pendjelasan Pem. tentang RUU pembatalan perse- tudjuan K.M.B.

- UNI MERUPAKAN ADANJA PAKSAAN TERHADAP INDONESIA.
- PERDJANDJIAN EKONOMI MENGHAMBAT KE-MAKMURAN RAKJAT DAN NEGARA INDONESIA.
- KEPENTINGAN2 PIHAK KETIGA AKAN DIHORMATI.

Djakarta, 7-4 (PIA).

Kabinet Ali Sastroamidjojo hari Djum'at tgl. 6 April telah menjampaikan kepada Parlemen rancangan undang2 pembatalan hubungan Indonesia - Nederland berdasarkan perdjandjian KMB lengkap dengan memori pendjelasannya, yang oleh kabinet telah di setudjui dalam sidangnja hari Selasa malam tanggal 3 April yang lalu. RUU ini didirinkan mendahului amanat Presiden, dan amanat Presiden tersebut akan segera disusulkan.

Bunji lengkap RUU tentang pembatalan hubungan Indonesia Nederland berdasarkan perdjandjian Konperensi Medja Bundar itu adalah sebagai berikut :

Menimbang : bahwa demi kepentingan Negara dan Rakjat Republik Indonesia yang sangat dirugikan oleh Perdjandjian Konperensi Medja Bundar di 's Gravenhage dalam tahun 1949 dan yang didaftarkan pada Skertariat PBB pada tanggal 14 Agustus 1950 No. 894, dianggap perlu membatalkan hubungan antara Indonesia dan Keradjaan Nederland atas dasar Perdjandjian ini, termasuk Statut Uni, persetudjuan2 yang dilampirkan, serta pula pertukaran2 surat dan prasasti2 lainnya.

Menimbang : bahwa telah berulang2 dinjatakan kepada Pemerintah Keradjaan Nederland, bahwa isi dan makna perdjandjian tersebut tidak dapat dipertanggung djawabkan lagi, karena Irian Barat sebagai bagian mutlak dari wilayah Repu-

blik Indonesia masih djuga didukung oleh Pemerintah Keradjaan Nederland, walaupun semus tinja telah lama harus diserahkan kepada Pemerintah Repu-

blik Indonesia yang penuh berhak atas bagian mutlak itu, pula karena Uni Indonesia — Nederland bagi Indonesia ternjata merupakan ikatan yang merugikan dan mempersulit usaha2 kearah pembangunan Negara;

Menimbang : bahwa dari pihak Indonesia senantiasa diusahakan guna mendapat persetudjuan dari Keradjaan Nederland untuk mewujudkan hubungan baru yang lazim antara Negara2 yang berdaulat penuh, dalam beberapa perundingan yg selalu kandas karena ketidaksediaan Pemerintah Keradjaan Nederland.

Menimbang : bahwa berdasarkan hal2 tersebut diatas tidak sejogia dan adil diminta dari pihak Pemerintah Indonesia kesediaan terus-menerus untuk mengadakan perundingan guna mentjapai perdjandjian bilateral untuk pembatalan yang dimaksudkan diatas dan karena itu tidak ada djalan (Bersambung ke hal. 4 kol. 3-4)

Pendjelasan Pem. ttg RUU pem-batalan persetudjuan KMB

(Landjutan dari hal. 1)

lain dari pada pembatalan unilate-
ral sesuai dengan arti dan makna
hukum Internasional;

Mengingat: Keputusan Presi-
den Republik Indonesia: Serikat
No. 33 tahun 1950, U.U. No. 7 ta-
hun 1950 dan Pasal-Pasal 89 dan
120 U.U. Dasar Sementara.

Dengan persetudjuan Dewan
Perwakilan Rakyat memutuskan:
Menetapkan Undang-undang tentang
pembatalan hubungan Indonesia-
Nederland berdasarkan perdjandji-
an Konperensi Medja Bundar.

P a s a l 1. Pemerintah Re-
publik Indonesia menjatakan, bah-
wa hubungan Republik Indonesia
dan Keradjaan Nederland atas
dasar perdjandjian Konperensi
Medja Bundar di 's-Gravenhage
dalam tahun 1949 dan jang didaf-
tarikan pada Sekretariat PBB pa-
da tanggal 14 Agustus 1950 No.
894, dengan ini dihapuskan dan
karena itu adalah batal.

P a s a l 2. Uni Indonesia -
Nederland sebagai dimaksudkan
dalam Statut Uni dengan ini diha-
puskan dan karena itu adalah
batal.

P a s a l 3. Statut Uni, ter-
masuk lampiran2nja serta perse-
tudjuan2 dan pertukaran surat jg
bersangkutan tentang hal kerlja
sama, baik dilapangan urusan lu-
ar negeri, Pertahanan dan Kebu-
dajaan, maupun dilapangan Per-
ekonomian dan Keuangan dihapus-
kan dan karena itu adalah batal.

P a s a l 4. Undang-undang, kepu-
tusan2 serta peraturan2 penjeleng-
garaan mengenai hal2 tersebut
dalam pasal 2 tidak berlaku lagi.

P a s a l 5. Hubungan anta-
ra Republik Indonesia dan Kera-
djaan Nederland selanjutnja ada-
lah hubungan jang lazim antara
Negara-Negara jang berdaulat
penuh, berdasarkan Hukum inter-
nasional.

terdapat hasrat dan ketulusan ka-
ti untuk menghormati kepenting-
an Rakyat dan Negara Republik
Indonesia.

Tentang finec.

Perdjandjian ekonomi dan ke-
uangan, jang tudjuannja seha-
rusnja dengan kerdjasama me-
nudju kearah kebahagiaan, me-
rupakan ikatan jang menghamb-
bat, membatasi dan pada achir-
nja melemahkan usaha kearah
pembangunan dan kemakmuran
Rakyat dan Negara.

Perdjandjian perekonomian
dan keuangan merugikan Indo-
nesia. Sedjak semula Uni menje-
bakkan adanja rasa paksaan
dan karena itu menyebabkan
adanja maksud melawan dan me-
mutuskan persekutuan-paksa
ini.

Telah ber-undang2 diadakan pe-
rundingan dengan Pemerintah Ne-
derland untuk menghapuskan hu-
bungan ini itu setjara damai da-
lam tahun 1954 dan baru2 ini da-
lam tahun 1955/1956 di Geneva,
akan tetapi tidak membawa ha-
sil jang sesuai dengan kehendak
dan harapan seluruh Rakyat Indo-
nesia.

Gayalnja perundingan dengan
Pemerintah Nederland jang ter-
achir, menyebabkan adanja keja-
kinan pada kita, bahwa dari Ji-
hak Pemerintah Nederland tidak
akan ada keinginan untuk mem-
nuhi kehendak dan harapan Rak-
jat Indonesia' itu.

Sebab2 jang nyata dan terbukti
ini mendesak Pemerintah Indone-
sia untuk membatalkan Perdjand-
jian KMB itu.

kepentingan
bangsa Belanda jang ada dalam
wilajah Republik Indonesia diper-
lakukan menurut aturan-aturan
tertjantum dalam Undang-Und-
ang Dasar Sementara Republik
Indonesia dan perundang-undang-
an jang berlaku atau jang akan
berlaku dalam wilajah Republik
Indonesia.

Perlakuan sebagai dimaksud-
kan diatas tidak dapat didasari-
kan atas hal-hak istimewa dgn
alasan apa djuapun.

P a s a l 7. Pelaksanaan Un-
dang-Undang ini diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

P a s a l 8. Undang-Undang
ini dapat disebut „Undang-Und-
ang Pembatalan K.M.B.”

P a s a l 9. Undang-Undang
ini berlaku mulai hari diundgan-
kan dan berlaku surut hingga
tanggal 13 Pebruari 1956.

Agar supaja setiap orang me-
ngetahuinja, memerintahkan pe-
ngundangan Undang-Undang ini
dengan penempatan dalam Lem-
baran Negara Republik Indone-
sia.

Pendjelasan umum.

Sebagai pendjelasan atas R.U.
U. tersebut dalam memori pendje-
lasannja dikatakan sebagai berli-
kut :

Hasil Konperensi Medja Bun-
dar, dimana Republik Indonesia
diakui kedaulatannja adalah sua-
tu perdjandjian jang mengatur
tjara kerdjasama antara Repub-
lik Indonesia dan Keradjaan Ne-
derland dan jang diwujudkan
atas dasar kesukarelaan, persua-
maan dan kemerdekaan sepenuhnya.

Sedjak Perdjandjian itu di-
djalkan, sudah mulai terasa,
bahwa dalam perdjandjian itu
terdapat anasir2 jang psycholo-
gisch dirasakan sebagai tekan-
an dan ada pula ketentuan2 la-
in jang dipandang mendjadi
rintangan dari usaha2 pempa-
ngunan Negara. Tekanan dan
rintangan itu semakin lama se-
makin berat dirasakannja.

Terutama bentuk Uni dengan
Ratu sebagai Kepala menimbulkan
kan perlawanan bathin jang he-
bat.

Perlawanan dan konflik psy-
chologis ini tidak dapat dihin-
darkan, bahkan makin lama ma-
kin mendalam setelah terbukti,
bahwa pasal 2 Piagam Uni oleh
Pemerintah Keradjaan Neder-
land ditafsirkan seakan-akan ti-
dak berlaku untuk Keradjaan
Nederland jang terus menerus
menduduki Irian Barat jang
merupakan wilajah-mutlak dari
Indonesia.

Indonesia akan membuat Pembangunan jang seimbang

Keterangan Mr. Ali Budiardjo

DJAKARTA, 24 Djuni (Antara) : — Ditanja mengenai bagaimana tontang nasib rentjana V tahun Indonesia hingga kini, Aching Direktur Biro Perantjang Negara Mr. Ali Budiardjo menjatakan bahwa sekarang rentjana tersebut sedang dalam pemitjaraan Dewan Ekonomi dan Perentjanaan kabinet. Ia harapkan agar pemitjaraan mengenai soal ini memperoleh perhatian khusus dari kabinet.

Selandjutnja ia katakan bahwa dalam rentjana V tahun itu, telah dijadikan pendirian utama untuk dapat mentjptakan suatu pembangunan jang seimbang diseluruh Indonesia. Pembangunan projek2 besar akan disesuaikan dengan ekonomische rentabilititeit tanpa mengingat didaerah mana projek tersebut dibangun, sementara itu pembangunan projek2 sedang diadakan spreiding didaerah2.

Ia katakan bahwa dalam pmbangunan projek2 besar itu jang termasuk prioritas dalam rentjana V tahun pertama ialah Projek Asahan dan Djatiluhur.

Sedang projek paberik rubuk jang direntjanakan akan diadakan didaerah Palembang dengan menggunakan sumber tenaga gas alam realisasinja baru dapat diharap dalam pelaksanaan rentjana V tahun kedua, demikian Mr. Ali Budiardjo.

Investasi

Ia ulangi keterangannya jang sudah2 bahwa jumlah investasi rentjana V tahun pertama akan meliputi 11,4 milyar rupiah untuk sektor pemerintah, 11,4 milyar rupiah untuk sektor partikelir dan 7,4 milyar rupiah untuk sektor padesaan.

Angka2 tersebut diperoleh dari perhitungan setjara ilmiah dan untuk sektor padesaan itu diambilkan beberapa sample survey jang dilakukan diberberapa desa dengan taksasi jang sangat rendah.

Dengan investasi sedjumlah itu maka untuk pendapatan nasional (national income) akan ditjapai kenaikan rata2 3% per tahun. Ia katakan bahwa pendapatan nasional dari tahun 1953 hingga 1955 naiknja rata2 4% setahun. Hal ini disebabkan karena ditahun2 itu Indonesia masih merhabilitir diri dari kerusakan2 jang dideritnja dari kehantjuran dimasa perang dan revolusi jl, dan modal2 masih melaksanakan herinvestasi di barengi pula dengan dilaksanakannya investasi baru meskipun dalam djumlahnja jang ketjil. Kejdjian2 tersebut merupakan suatu „pembumbuhan“ dari investasi dan menurut taksiran hingga dapat menaikan pendapatan nasional dengan 4% rata2 setahunnja. Setelah mengindjak pelaksanaan rentjana V tahun jang dimulai pada tahun ini (1956 sampai dengan 1960) rata2 hanya akan mengalami kenalkan dalam pendapatan nasional 3% per tahunnja berhubung dengan keadaan

investasi sudah mulai berdjalan dalam keadaannya jang biasa (normal). Setelah rentjana V tahun kedua berdjalan maka Indonesia dapat memperoleh djumlah kenaikan pendapatan nasional jg lebih meningkat.

Dalam waktu 20 s-d 25 tahun Indonesia mengedjar negeri2 jang telah maju dalam industrinja.

Diterangkan lebih djauh bahwa didalam waktu 20 sampai dengan 25 tahun bila Indonesia sungguh2 membangun akan dapat mengedjar ketinggalan2 jang selama ini diderita dari negeri2 jang telah maju dalam industrinja. Ia nja taktir kesimpulan ini dengan sedikit optimistis dan menegaskan bahwa perhitungan tsb, didasarkan atas kenjataan2 jang ada, sekalipun negeri2 jang kini telah maju industrinja sudah mulai menggunakan „atom energie“ jg mempunyai kemungkinan lebih banyak untuk memajukan industrinja dan pendapatan nasionalnja masing.

Beberapa pengutamaan.

Mendjawab pertanjaan apakah ada beberapa pengutamaan jang akan diambil dalam rangka pembangunan V tahun pertama di Indonesia dalam sektor pertanian, Mr. Ali Budiardjo katakan bahwa:

- a. akan diutamakan perbaiknja irigasi
- b. akan dimulai mengadakan survey mengenai kemungkinan membangun projek rabuk dengan tenaga dari gas alam didaerah Palembang jang realisasinja

baru diharapkan pada rentjana V tahun ke-II.

c. memperluas perkebunan2 per tjobaan, perluasan penjelidikan tanah, dan reboisasi.

d. perluasan armada penangkai ikan dan meringgikan mutu perangkapan ikan dengan mekanisasi

e. menambahkan djumlah paberik pengawetan ikan.

Dalam lapangan industri jang akan memperoleh pengutamaan ialah:

a. paberik semen (Gersik b., penjelidikan kemungkinan pendirian projek besi dan badja jang kini telah mulai diadakan surveynja.

Perburuhan.

Mendjawab pertanjaan apakah telah dapat diperhitungkan setjara tepat pembukaan projek2 baru dalam rangka rentjana V tahun pertama dan perluasan berbagai aktivitas usaha itu akan dapat menampung beberapa djumlah orang jang belum mempunyai mata pen tjahatan, Mr. Ali Budiardjo menjatakan bahwa angka2 jang tepat masih sukar untuk dikemukakan. Hal ini disebabkan karena hingga kini masih dirasa sangat kurangnya keterangan2 statistik jang dibutuhkan guna membahas soal2 tersebut dengan tepat, demikian Acting Direktur Biro Perantjang Negara Mr. Ali Budiardjo.

